

MEMBANGUN DESA PERADABAN

Salah satu ciri keberhasilan sebuah peradaban adalah adanya pembangunan. Namun sejak dicanangkannya pembangunan di Indonesia, mulai dari era Orde Lama sampai era reformasi, pembangunan masih milik orang kota. Baik itu pembangunan sarana maupun prasarana, hanya orang-orang yang tinggal di perkotaan yang bisa merasakan pembangunan. Sementara di desa tetap jauh tertinggal, orang-orang desa hanya berkutat pada bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang tidak tersentuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya.

Kehadiran buku ini menyadarkan kita sekaligus memberikan kita alternatif dalam membangun peradaban di desa. Karena sudah saatnya pembangunan diawali dan dilakukan pula di pedesaan biar ada pemerataan dan keadilan.

Buku ini tidak hanya mengajak melakukan pembangunan sehingga terwujud desa yang memiliki peradaban tinggi. Sang penulis dengan piawai mengeksplorasi materi membangun desa peradaban berbasis pendidikan formal dan non formal, juga memberikan langkah-langkah strategis mulai dari pendekatan, mekanisme, proses, sampai menjadikan desa sebagai desa yang unggul, kompetitif.



Alamat:
Komp. Bumi Aeri No. A4
Ujungberung - Bandung 40614
Telp. 022-7803917
e-mail: insan-komunika@gmail.com



MEMBANGUN DESA PERADABAN

Berbasis Pendidikan

Pengantar:
Dr. K.H. Syukriadi Sambas, M.Si
Ketua LPPM UIN SGD

Dr. H. A. Rusdiana, MM



Dr. H. A. Rusdiana, MM

MEMBANGUN DESA PERADABAN

Berbasis Pendidikan





MEMBANGUN DESA PERADABAN

Berbasis Pendidikan

Penulis: Dr. H. A. Rusdiana, MM

Editor:

Encep Dulwahab

Cover:

Yodi W. Rosyadi

Desain isi:

Yodi W. Rosyadi

Sumber foto cover:

www.desamerdeka.com

www.hardiknas-fi.blogspot.com

www.platarankembangan.blogspot.com

www.commonswikimedia.org

www.bp.blogspot.com

Cetakan Pertama, Maret 2013

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

all right reserved

Diterbitkan oleh:

Penerbit Insan Komunika

Komp. Bumi Asri No. A4

Ujungberung - Bandung 40614

Telp. 022-7803917

e-mail: insan-komunika@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rusdiana

Pendidikan Kewirausahaan

Rusdiana; editor, Encep Dulwahab, —Cet. 1. —Bandung:

Insan Komunika, 2013

xii+262 hlm, 145 x 205 cm

ISBN : 978-602-18240-6-1

Kata Pengantar

Dr. K.H. Syukriadi Sambas, M.Si.

Ketua LPPM UIN SGD

Desa memiliki posisi strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak berlebihan jika dalam RUU Desa versi dan inisiasi DPD RI (Senat Indonesia), desa dipandang, disikapi dan diusulkan untuk diposisikan sebagai “Negara Kecil” dengan seluruh potensinya. Tidak saja karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa, tapi desa adalah Sumber Daya.

Sumber Daya Desa memiliki berbagai potensi, baik dari aspek Sumber Daya Alam, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, terutama Sumber Daya Manusia. Sayang, berbagai potensi ini belum secara maksimal dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor antara lain: masih tingginya angka kemiskinan di desa, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara formal, dan masih banyaknya ditemui pengangguran.

Ketiga permasalahan tersebut yakni: kemiskinan, pendidikan dan pengangguran perlu mendapat perhatian berbagai pihak; pemerintah dan parlemen (DPR RI dan DPD RI) terutama dengan UU Desa-nya, swasta dengan CSR (Corporate Social Responsibility)-nya, lembaga swadaya masyarakat maupun media, tidak hanya berpihak tetapi langsung terlibat dan dirasakan langsung oleh Masyarakat Desa. Ini penting agar masyarakat desa memiliki motivasi dan kapasitas dalam menumbuhkembangkan potensi sumberdaya yang begitu melimpah.

Propinsi Jawa Barat meluncurkan Program Desa Peradaban Sebagai Upaya Pemberdayaan Desa Berbasis Masyarakat. Apabila

dilihat dari sudut pandang Ke-Islaman, hal tersebut pada hakikatnya adalah Desa Madani, mengingat begitu strategisnya posisi desa. Antara lain: Pertama, desa merupakan daerah penyangga pangan, baik bagi masyarakat desa sendiri maupun masyarakat yang tinggal di kota. Pangan sebagai kebutuhan pokok kalau terkelola dengan baik maka akan mampu menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan bangsa.

Kedua, desa juga merupakan pusat pengembangan Sumber Daya Manusia dalam berbagai bidang termasuk penyiapan para calon pemimpin masa depan. Apabila sumberdaya manusia yang ada di desa memiliki kapasitas memadai maka kontribusi mereka terhadap pembangunan bangsa juga akan meningkat. Dengan pemberdayaan SDM ini, maka problematika masyarakat kota seperti urbanisasi juga akan teratasi dengan sendirinya. Untuk itu, program-program pendidikan baik yang bersifat formal maupun informal perlu diluncurkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Ketiga, desa memiliki potensi wisata, budaya dan lingkungan yang masih alami. Hal ini tentu dapat menjadikan desa sebagai salah satu pusat untuk mengembangkan program tujuan wisata. Dengan program Home Stay (tinggal di rumah penduduk) misalnya, desa dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun manca negara menikmati dan memahami kearifan lokal (Local Wisdom) berbasis desa, terutama bagi masyarakat perkotaan.

Berkaitan dengan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pendidikan harus mampu memberikan nilai lebih dalam masyarakat. Pertanyaannya; apakah masyarakat sudah bisa mempunyai akses yang sama pada pendidikan? Jalur pendidikan memang tidak bisa digebuk rata. Setiap kondisi masyarakat tentunya memiliki ciri dan tantangan masing-masing dalam mendapatkan akses pendidikan. Pendidikan sejatinya harus bisa dimaknai sebagai ruang terbuka yang setiap orang berhak mendapatkannya. Salah satu solusi untuk mendapatkan pendidikan adalah dengan diadakannya pendidikan

nonformal bagi masyarakat. Inilah kunci bagaimana pendidikan berbasis masyarakat bisa diterapkan dengan menyesuaikan pada kondisi masyarakat setempat.

Apa itu pendidikan berbasis masyarakat? Jika merujuk pada pendapat Mark K. Smith: “Pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka. Pendekatan pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik.”

Masyarakat yang ada di kota, hutan, pantai, atau daerah lainnya mereka lebih tahu apa yang semestinya disesuaikan dengan konsep pendidikan mereka sendiri. Misalnya, jika di daerah tertentu termasuk daerah yang terkenal dengan daerah kerajinan, konsep yang cocok adalah yang bisa menjembatani mereka. Masyarakat yang biasa kerja dalam sektor kerajinan dapat belajar bagaimana konsep wirausaha, berdagang dengan memadukan promisi langsung dan online, bagaimana belajar membuat surat perjanjian, hingga belajar bagaimana pengemasan yang baik. Jika tempat kerajinannya banyak disambangi turis asing, pembelajaran bahasa asing juga bisa diterapkan.

Jadi, pada hakikatnya ada kesinambungan antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jangan sampai, pendidikan hanya menjadi biasa antara kebutuhan dan apa yang dibutuhkan secara real tidak “nyambung”. Inilah yang selama ini salah satunya menjadi akar masalah pendidikan di kita, ketika pendidikan hanya sebatas teori. Namun, ketika dihadapkan pada

kebutuhan, seakan terjadi alienisasi. Padahal, pendidikan adalah memanusiakan manusia untuk secara sadar mampu menjawab; Apa yang saya butuhkan sekarang? Seberapa besar kualitas saya sebagai manusia dengan mengikuti pendidikan? Sudahkah pendidikan menjadi solusi akan kehidupan saya? Sudah barang tentu hal tersebut perlu diketahui oleh insan pendidikan, guna memecahkan beberapa persoalan pendidikan di atas.

Dengan terbitnya buku “Membangun Desa Peradaban Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh saudara Dr. H. A. Rusdiana, MM, sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, di dalamnya memberikan sebuah harapan pada insan pendidik, pengadi dan peneliti dalam rangka mengembangkan tugas tridhama PT, terutama para dosen, mahasiswa untuk mengkaji lebih mendalam sehingga memberikan alternatif pemikiran, pijakan, dan tauladan kepada pengguna, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pembentukan karakter pendidikan yang bermutu.

Dengan hadirnya buku “Membangun Desa Peradaban Berbasis Masyarakat” Saya menyabut baik, sebagai karya ilmiah dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan harapan selain sebagai bahan kajian dan diskusi di kelas juga dapat memberikan nilai tambah bagi para pendidik, pengelola pendidikan, pengamat pendidikan, dan masyarakat luas.

Bandung, 19 Juli 2013

Dr. K. H. Syukriadi Sambas, M.Si.

Kata Pengantar

Peradaban identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Secara metafisis, peradaban juga berarti bahwa manusialah yang merupakan pusat alam semesta (*man centred universe*) dan bukan Tuhan (*God centred universe*). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep peradaban kemudian diasosiasikan dengan kebangkitan negara-negara *absolut*, otonomi politik lokal dan uniformitas kultural yang lebih besar dalam negara-negara itu. Segala hal, berupa perbuatan dan pemikiran manusia tak bisa dilepaskan dari peradaban. Jadi, konsep peradaban bersifat mencakup semua. Oleh karena itu, menjadi beradab adalah menjadi santun dan berakhlak baik dan peduli pada orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan sebagainya (Mennell, Norbert Elias, 1989: 35).

Manusia dan peradaban merupakan dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Manusia melalui kemampuan cipta dan karya selalu melakukan karya-karya di segala bidang kehidupan. Istilah peradaban mempunyai arti yang erat kaitannya dengan manusia. Istilah peradaban seringkali merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks. Peradaban manusia bisa dilihat melalui praktik pertanian, hasil karya, permukiman, dan berbagai pandangan manusia mengenai ilmu pengetahuan, politik, dan kehidupan.

Dalam perjalanan peradaban manusia, ada suatu fenomena yang harus dihadapi, yaitu terjadinya benturan peradaban. Huntington (1993), menyebutnya dengan istilah *clash civilization*. Pada zaman modern, Huntington meyakini bahwa peradaban-peradaban yang muncul akan menimbulkan proses benturan-benturan. Benturan itu terjadi bisa antara peradaban Barat dan Timur. Bisa juga karena perbedaan ideologi. Satu hal yang tidak boleh terjadi adalah berhenti mempelajari peradaban manusia. Peradaban manusia harus terus dikaji atau dipelajari. Sejarah peradaban manusia dari tiap masa tidak boleh hilang. Karena dari belajar peradaban di masa lalu itulah, kita bisa bercermin untuk mengembangkan peradaban manusia masa mendatang.

Menyikapi perubahan perkembangan yang semakin menglobal, UNESCO menerapkan empat pilar belajar, yaitu *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Live Together*, *learning to Be*. Pada *learning to know* terkandung makna bagaimana belajar, *learning to do* mengandung dimensi kecakapan hidup manusia, *learning to live together* mengandung dimensi kehidupan multikultural, dan *learning to be* mengandung makna belajar untuk mengenal jati diri, kemampuan dan kelemahan serta kompetensi yang dikuasai untuk membangun kehidupan yang utuh secara terus-menerus.

Akibat dari penerapan empat pilar belajar tersebut, melahirkan konsep revolusi belajar, untuk melakukan perubahan model pembelajaran dari cara-cara pembelajaran tradisional kearah model pembelajaran modern, yang menghendaki peserta didik untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam belajar. Model pembelajaran modern, yaitu melatih para peserta didik untuk menjadi sumber belajar, mengubah model belajar pasif (*passive learning*) menjadi belajar aktif (*active learning*), mengubah model berpikir fakta (*factual thinking*) menjadi berpikir kritis (*critical thinking*), dari kurang aktif memberi respons menjadi proaktif memberi respons, dari berpikir abstrak menjadi autentik. Perubahan ini, menempatkan peranan Pendidikan Nonformal dan Informal dalam posisi yang strategis.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ix
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Rasionel.....	1
B. Memaknai Peradaban Manusia	3
C. Pembangunan Masyarakat Desa.....	5
1. Hakikat Pembangunan.....	5
2. Desa dan Masyarakat Desa	6
3. Pembangunan Masyarakat Desa.....	9
D. Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan Masyarakat	13
1. Desa Peradaban	13
2. Pendidikan Sebagai Pembangunan Peradaban Bangsa.....	15
E. Pendidikan Berbasis Masyarakat	16
1. Konsep <i>Community</i> dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat	18
2. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Beberapa Perspektif	23
BAB 2 Eksistensi Pendidikan Berbasis Masyarakat....	33
A. Perlunya Pendidikan Berbasis Masyarakat	33
B. Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat	35

1. Landasan Pendidikan Berbasis Masyarakat	35
2. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat ..	36
3. Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat	38
C. Prinsip-Prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	40
1. Prinsip Menentukan Sendiri	42
2. Prinsip Menolong Diri Sendiri	43
3. Prinsip Pengembangan Kepemimpinan	45
4. Prinsip Lokalisasi	48
5. Prinsip Keterpaduan Pemberian Pelayanan	49
6. Mengurangi Tumpang Tindih Pelayanan ...	52
7. Prinsip Menerima Perbedaan	54
8. Prinsip Tanggung Jawab Kelembagaan	57
9. Prinsip Pembelajaran Seumur Hidup	58
D. Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	61
1. Kebijakan Operasional Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat	62
2. Persyaratan Teknis Operasionalisasi Pe- laksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat	64
3. Harapan Masyarakat terhadap Perbaikan Layanan Kualitas Pendidikan Berbasis Masyarakat	65
BAB 3 Pendidikan Non Formal Memberdayakan Masyarakat (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat)....	69
A. Perlunya Pendidikan Non Formal.....	69
B. Makna Hakiki Pemberdayaan Masyarakat	70
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	70
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	72
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	73
1. Menciptakan Suasana atau Iklim yang Memungkinkan Potensi Masyarakat	

Berkembang (Enabling).....	74
2. Memperkuat Potensi atau Daya yang Dimiliki oleh Masyarakat (Empowering)...	75
3. Memberdayakan.....	76
D. Pendekatan, Metodologi dan Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	78
1. Pendekatan-pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	78
2. Metodologi Evaluatif dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	82
3. Berbagai Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat	86
E. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat.....	87
1. Peran Pemerintah	87
2. Peran Organisasi Kemasyarakatan.....	88
3. Peran Lembaga Memasyarakatkan.....	89
4. Peran Koperasi.....	90
5. Peran Pendamping.....	90
6. Pemberdayaan Masyarakat Harus Dicerminkan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional	91
7. Keikutsertaan Masyarakat yang Lebih Mampu	92
F. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	93
1. Menekankan pada Proses Memberikan atau Mengalihkan Sebagian Kekuatan.....	93
2. Proses Pemberdayaan yang Melahirkan Masyarakat yang Memiliki Sifat yang Diharapkan	94
G. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Non Formal.....	95
1. Pendekatan Pendidikan Non Formal	97

2. Strategi Dasar Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Non Formal.....	98
3. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Non Formal.....	99
BAB 4 Konsep Pendidikan Non Formal	101
A. Perlunya Konsep Pendidikan Non Formal.....	101
B. Konsep Dasar Pendidikan Nonformal	103
1. Pengertian Pendidikan Nonformal.....	103
2. Kerangka Konseptual	106
C. Program dan Satuan Pendidikan Nonformal.....	107
1. Program Satuan Pendidikan Non Formal .	107
2. Program Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	109
3. Program-Program Pendidikan Non Formal untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan.....	111
D. Terapan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) dalam Pendidikan Non Formal.....	115
1. Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup.....	115
2. Kriteria Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	116
3. Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup.....	116
4. Ciri-ciri Pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup.....	116
5. Bidang Kerja Pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup.....	117
6. Berkesinambungan	118
7. Implementasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills).....	119
8. Kendala Program Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills)	119

BAB 5	Karakteristik Kemandirian Dalam Pendidikan	
	Non Formal	121
	A. Perlunya Memahami Karakteristik Kemandirian dalam Pendidikan Non Formal	121
	B. Karakteristik Kemandirian dalam Pendidikan Nonformal.....	121
	1. Kompetensi yang Dikembangkan Dalam Pendidikan Nonformal	122
	2. Mengembangkan Kemandirian Dalam Proses Pembelajaran PNF.....	134
	C. Faktor-Faktor Meningkatkan Kemandirian Dalam PNF	144
	1. Kegiatan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik.....	144
	2. Kesesuaian Isi Program dengan Sifat-Sifat Individualitas Peserta Didik	149
	3. Faktor Keturunan dan Kesesuaiannya dengan Isi Program	149
	4. Kesesuaian Isi Program dengan Faktor Lingkungan	150
	5. Pengelolaan Pembelajaran pada Pendidikan Nonformal.....	154
BAB 6	Manajemen Pengembangan Pendidikan Non	
	Formal	169
	A. Perlunya Manajemen Pendidikan Non Formal ...	169
	B. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Strategi Pengembangannya.....	170
	1. Strategi-strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	170
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia	174
	C. Sistem Strategik dan Perencanaan Sumber Daya Manusia	177

1. Human Resource Concern.....	177
2. Key Issues Oriented.....	178
3. People Related Bussiness Issues.....	178
4. Keterlibatan Manajer Lini	179
5. Partisipasi Warga Belajar (Pemegang) dalam Pengelolaan Pembelajaran	180
BAB 7 PKBM Wadah Pembelajaran dari, Oleh dan Untuk Masyarakat	185
A. Perlunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.....	185
B. Makna Hakiki Pusat Kegiatan Belajar Masya- rakat	187
1. Sejarah dan Pengertian PKBM.....	187
2. Dasar Hukum Pengembangan PKBM.....	193
3. Fungsi dan Asas PKBM.	194
C. Pengembangan PKBM untuk Pemberdayaan Masyarakat	195
1. Perintisan/Persiapan Pembentukan PKBM.	195
2. Pembentukan/Pendirian PKBM.....	197
D. Program Pengembangan Kegiatan PKBM.....	204
1. Kegiatan Pembelajaran	204
2. Kegiatan Usaha/Ekonomi Produktif (Bisnis).....	205
3. Kegiatan Pengembangan Masyarakat	206
4. Administrasi Pendirian PKBM.....	207
E. Klasifikasi PKBM.....	207
1. PKBM Dasar.....	208
2. PKBM Berkembang.....	208
3. PKBM Ideal	208
BAB 8 Strategi Pengembangan PKBM Mandiri, Unggul dan Kompetitif Menuju Desa Peradaban Berbasis Pendidikan	209
A. Perlunya Pengembangan PKBM.....	209

B. Analisis Potensi dan Masalah dalam Pengembangan PKBM	211
1. Potensi Pengembangan PKBM.....	211
2. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan PKBM	213
C. Strategi Pengembangan PKBM Mandiri, Unggul dan Kompetitif	218
1. Pengembangan Kemampuan.....	222
2. Pembentukan Jaringan dan Kemitraan	223
3. Pemberdayaan Masyarakat	224
D. Program Pengembangan PKBM Mandiri, Unggul dan Kompetitif	225
1. Pengembangan Kelembagaan dan Organisasi.....	226
2. Pengembangan Manajemen Pengelolaan PKBM	229
3. Pengembangan Ketenagaan/Sumberdaya Manusia	231
4. Pengembangan Sarana Prasarana dan Informasi	232
5. Pengembangan Dana (Pembiayaan)	233
6. Pengembangan Pembelajaran	234
7. Pengembangan Kerjasama (Networking) ..	241
8. Pengembangan/Peningkatkan Partisipasi Masyarakat	242
Daftar Pustaka	247
Profil Penulis	259

1

Pendahuluan

A. Rasionel

Pembangunan pada dasarnya dilaksanakan untuk memberikan jalan keluar bagi problema-problema yang dihadapi manusia. Sifat manusia yang dinamis yang menimbulkan problema-problema tersebut, tetapi perubahan adalah suatu sunatullah. Problema tersebut bisa muncul dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, hukum, politik, dan aspek lain yang berhubungan dengan aktivitas manusia, terutama manusia dalam sebuah negara.

Pembangunan secara umum erat kaitannya dengan pendidikan, industri, dan ekonomi. Kaitannya bahwa perkembangan pendidikan dan teknologi berdampak pada perkembangan industri dan merupakan syarat mutlak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua segi kehidupan manusia ini ditata secara terencana, dan inilah yang disebut sebagai pembangunan.

Tujuan pembangunan nasional dalam Moh. Soerjani *et al.* (Eds) (2008: 252):

”... untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamik, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

Ini berarti bahwa sasaran utama pembangunan adalah manusia itu sendiri sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dari sini diketahui bahwa fokus utama pembangunan adalah manusia. Pembangunan Indonesia pun dalam rencananya memperhatikan kemajuan manusia, lingkungan sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan tidak semua bisa dicegah.

Peradaban adalah identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Secara metafisis, peradaban juga berarti bahwa manusialah yang merupakan pusat alam semesta (*man centred universe*) dan bukan Tuhan (*God centred universe*). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep peradaban kemudian diasosiasikan dengan kebangkitan negara-negara absolut, otonomi politik lokal dan uniformitas kultural yang lebih besar dalam negara-negara itu. Segala hal, berupa perbuatan dan pemikiran manusia tak bisa dilepaskan dari peradaban. Jadi, konsep peradaban bersifat mencakup semua. Oleh karena itu, menjadi beradab adalah menjadi santun dan berakhlak baik dan peduli pada orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan sebagainya (Mennell, Norbert Elias, 1989: 35).

Manusia dan peradaban merupakan dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Manusia melalui kemampuan cipta dan karya selalu melakukan karya-karya di segala bidang kehidupan. Istilah peradaban mempunyai arti yang erat kaitannya dengan manusia. Istilah peradaban seringkali merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks. Peradaban manusia bisa dilihat melalui praktik pertanian, hasil karya, permukiman, dan berbagai pandangan manusia mengenai ilmu pengetahuan, politik, dan kehidupan.

Dalam perjalanan peradaban manusia, ada suatu fenomena yang harus dihadapi, yaitu terjadinya benturan peradaban. Huntington (1993), menyebutnya dengan istilah *clash civilization*. Pada zaman modern, Huntington meyakini bahwa peradaban-peradaban yang muncul akan menimbulkan proses benturan-benturan. Benturan itu terjadi bisa antara peradaban Barat dan Timur. Bisa juga karena perbedaan ideologi. Satu hal yang tidak boleh terjadi adalah berhenti mempelajari peradaban manusia. Peradaban manusia harus terus dikaji atau dipelajari. Sejarah peradaban manusia dari tiap masa tidak boleh hilang. Karena dari belajar peradaban di masa lalu itulah, kita bisa bercermin untuk mengembangkan peradaban manusia masa mendatang.

B. Memaknai Peradaban Manusia

Peradaban berasal dari kata adab, yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Huntington (2001) mendefinisikan peradaban (*civilization*) sebagai: *"The highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguish humans from other species"*.

Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa dan menjadi bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa lain pada zamannya.

Kata peradaban dalam bahasa Indonesia, sering diidentikkan dengan kata kebudayaan. Akan tetapi dalam bahasa Inggris, terdapat perbedaan pengertian antara *civilization* untuk peradaban dan *culture* untuk kebudayaan. Demikian pula dalam bahasa Arab dibedakan antara *tsaqafah* (kebudayaan), *badharah* (kemajuan) dan *tamaddun* (peradaban). Dalam bahasa Melayu istilah *tamaddun*

dimaksudkan untuk menyebutkan keduanya yaitu kebudayaan dan peradaban (LESF, 2004: 7).

Peradaban (*civilization*) dapat diartikan sebagai hubungannya dengan kewarganegaraan karena diambil dari kata *civies* (Latin) atau *civil* (Inggris) yang berarti seorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini dapat diartikan dengan dua cara: (1) proses menjadi berkeadaban, (2) suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju. Berdasarkan pengertian tersebut maka indikasi suatu peradaban adalah adanya gejala-gejala lahir seperti masyarakat yang telah memiliki berbagai perangkat kehidupan (Fyzee, 1982: 7-11).

Pada dasarnya peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta (akal) manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang harus maju dan indah. Kebudayaan berasal dari kata *culture*, istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan.

Koentjaraningrat (1990:182) menguraikan lebih jelas mengenai peradaban sebagai berikut: Di samping istilah “kebudayaan” adapula istilah “peradaban”. Hal yang terakhir adalah sama dengan istilah Inggris *civilation* yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, dan sebagainya. Istilah “peradaban” sering juga dipakai untuk menyebutkan suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi,

ilmu pengetahuan, seni rupa, dan sistem kenegaraan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Dengan kata lain, peradaban itu merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju.

Peradaban umumnya dipahami sebagai entitas sosial yang besar melebihi individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Peradaban juga berarti pengelompokan tertinggi orang-orang dan tingkat identitas budaya yang luas dan komprehensif yang membedakannya dengan entitas lainnya. Peradaban dibatasi oleh unsur-unsur objektif seperti bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, pandangan dunia (world view), lembaga-lembaga. Ia juga dibatasi unsur subjektif berupa identitas diri peradaban.

Keluasan dan komprehensivitas peradaban menjadikannya tidak eksklusif milik suatu bangsa atau negara tertentu. Ia bersifat melintasi (beyond) batas-batas geografis dan geopolitis sebuah negara. Dalam catatan Arnold Toynbee, setidaknya ada dua puluh satu peradaban yang pernah hidup dan mendiami dunia ini, namun sebagian besarnya sudah mengalami siklus kemusnahan sehingga tidak meninggalkan sisa apa pun (Munawar, AM, 2002).

C. Pembangunan Masyarakat Desa

1. Hakikat Pembangunan

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan.

Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat

sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya.

Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Desa dan Masyarakat Desa

Desa, masyarakat desa, pembangunan desa-desa, merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian. Rahardjo, (1999: 28) memberikan pengertian desa dalam arti umum adalah; "Desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama".

Secara khusus Rahardjo, (1999: 29), memberikan pengertian "Desa adalah setiap pemukiman para petani (peasant) sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus terlekat pada setiap desa" Ciri utama yang terlekat pada desa, ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka"

Pada umumnya pengertian desa sering dikaitkan dengan sektor pertanian, alasannya asal-muasal desa karena pengenalan cocok tanam. Secara keilmuan, ahli sosiologi menyatakan bahwa

desa merupakan lingkungan di mana warga memiliki hubungan akrab dan bersifat informal.

Haw Widjaja (2002: 65), memberikan pengertian desa adalah sebagai berikut :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten” (Widjaja, 2002:65).

Selanjutnya Widjaja, (2002: 66), memaknai pengertian desa sama dengan nama marga sebagai berikut:

“Marga berasal dari serikat dusun-dusun atau kampung baik atas susunan masyarakat genealogis maupun masyarakat teritorial, berdasarkan keturunan dan tempat dilahirkan. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang dilahirkan, dibesarkan, hidup dan bermata pencaharian dan meninggal dunia di tempat itu”

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh pendapat dari beberapa para ahli di atas, maka dari pengertian Desa sesuai dengan pengertian desa berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara teoritis, di samping yang telah dirumuskan dalam kesatuan perundang-undangan. Di sini juga terlihat bahwa adanya dukungan pemerintah yang diserahkan kepada warga desa untuk mengatur dan mengurus desa berdasarkan potensi desa itu sendiri. Salah satu dari sekian banyak rumusan pengertian desa seperti

dikemukakan Siagian, (1989:3), dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Pembangunan Desa, Masyarakat Desa sebagai berikut:

“Desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu Kepala Desa. Kehidupan penduduk desa umumnya tergantung dari usaha tani, nelayan dan sering disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan”

Berdasarkan pengertian di atas, desa adalah organisasi pemerintahan terendah yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa juga merupakan wilayah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekelompok masyarakat yang mempunyai aturan-aturan, norma hukum yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Masyarakat desa identik dengan petani karena masyarakat desa sebagian besar bermata pencaharian pertanian. Petani yang ada di pedesaan biasanya sering disebut petani kecil atau *peasan*. Yang dimaksud dengan *peasan* menurut Eric R. Wolf (Rahardjo, 1999: 67). *peasan* adalah penghasil-penghasil pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif, yang melakukan pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya, bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan.

Selanjutnya Menurut Belshaw (Rahardjo, 1999: 67), menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat desa atau masyarakat *peasan* adalah yang *way of life-nya* berorientasi pada tradisionalitas, terpisah dari pusat perkotaan tetapi memiliki keterkaitan dengannya, yang mengkombinasikan kegiatan pasar dengan produksi subsistem.

Masyarakat desa erat sekali kaitannya dengan kebudayaan tradisional, bahwa kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat desa amat tergantung kepada pertanian, tingkat tekno-

loginya rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka menurut Paul H. Landis (1948) , bahwa pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa akan ditentukan oleh: (1) sejauhmana ketergantungan mereka terhadap pertanian; (2) tingkat teknologi mereka; (3) sistem produksi yang diterapkan.

Menurut Roucek & Warren (1962), dalam memahami masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) peranan kelompok primer sangat besar; (2) faktor geografik sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat; (3) hubungan lebih bersifat intim dan awet; (4) struktur masyarakat bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial rendah; (6) keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Pitinn A. Sorokin dan Carle C. Zimmerman (T. L. Smith & P.E.Zop, 1970), mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik masyarakat desa dan kota, yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, differensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritas sosial.

3. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat desa sebagai suatu kegiatan yang berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan memerlukan adanya penggerak dari dalam masyarakat itu sendiri (inner will) dalam bentuk partisipasi dan keswadayaan. Partisipasi dan keswadayaan merupakan dua konsep yang bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan.

A. Suryadi (1983), mendefinisikan pembangunan masyarakat desa (PMD), sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan

bersama untuk memenuhi keinginan meraka tersebut. Di sini tekanannya pada seluruh masyarakat.

Sedangkan definisi lain, menekankan pada peranan badan atau organisasi pembangunan. Seperti halnya dengan di Cambridge, England pada tahun 1948, PMD, itu didefinisikan oleh para administrator kolonial sebagai suatu gerakan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatip ini tidak datang, maka dipergunakan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorong keluar supaya kegiatan dan respon antusias terjamin. Hal ini meliputi seluruh bidang kegiatan pembangunan di distrik-distrik, apakah hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah ataupun badan swasta (A. Suryadi, 1983: 17).

Partisipasi merupakan wujud peranserta masyarakat pedesaan dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan, mulai dari pengkajian potensi dan masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan hasil, monitoring dan evaluasi, sampai dengan tindak lanjut pelestarian program.

Konsep partisipasi telah lama menjadi bahan kajian dan telah meluas sehingga penggunaannya terkadang dipakai untuk visi misi suatu daerah. Konsep partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah tepat, karena sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. Pertama alasan etis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subjek, kedua alasan sosiologis, yaitu bila pembangunan diharapkan berhasil dalam jangka panjang tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet (Kodotie. 2003).

Sehubungan dengan pendapat tersebut, pembangunan harus bertolak dari kenyataan yang ada meliputi sikap mental maupun struktur masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk

menyadari kebutuhannya dan berusaha menghindari segala hambatan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Penyadaran masyarakat tidak dapat dengan indoktrinasi, tetapi melalui aktivitas mereka sendiri. Untuk itu harus dihindarkan anggapan bahwa masyarakat itu bodoh, sebab mereka banyak mengetahui apa yang mereka butuhkan.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyadari akan kebutuhan pokok hidupnya mereka harus diberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya air bersih melalui media sosialisasi atau program pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat setempat, sehingga mereka lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan mempertahankan atau meningkatkan lebih baik.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada tahap pasca konstruksi, yaitu apakah nilai-nilai dari pembelajaran lewat pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat diserap oleh masyarakat dan ditindaklanjuti sampai tahap pemeliharaan sehingga pembangunan prasarana penyediaan air bersih dapat berkelanjutan. Menurut Bintarto (1983), bahwa tiap-tiap desa mempunyai *geographical setting* dan *human effort* serta letak yang berbeda-beda. Sehingga tingkat keadaan kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Sedangkan keswadayaan merupakan potensi dan kemampuan masyarakat desa dalam mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki demi mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan pembangunan. Keswadayaan bisa dipahami sebagai upaya yang didasarkan atas kepercayaan dan kemampuan sendiri dan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar, atau kekuatan dari atas. Namun demikian, peningkatan keswadayaan tidak perlu menempatkan masyarakat desa secara terisolasi, akan tetapi justru didorong tumbuhnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan.

Dalam rangka menumbuhkan pola pengelolaan pembangunan yang berbasis pada partisipasi dan keswadayaan, maka upaya menggugah kemampuan dan rasa percaya diri masyarakat desa agar membangun dengan mengutamakan kemampuan sendiri (self confidence) sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, perlu diberikan peluang luas bagi masyarakat untuk menemukan potensi keswadayaan yang berupa sumber daya alam, modal sosial, tata-nilai dan kelembagaan lokal maupun sumber-sumber lain yang mereka miliki semacam akses dan peluang kerjasama dengan pihak luar.

Strategi pemberdayaan melalui pengalokasian berbagai bantuan yang telah berlangsung selama ini acap kali hanya menghasilkan distorsi, di mana masyarakat penerima bantuan tidak semakin berdaya dan mandiri melainkan sebaliknya semakin tergantung terhadap bantuan dari luar. Hal ini selain disebabkan oleh kekurangtepatan strategi pemberdayaan yang diterapkan, juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan mendayagunakan potensi atau keswadayaan masyarakat lokal.

Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Community Capacity Building), secara khusus bertujuan untuk *mengembangkan kapasitas individu, kapasitas ekonomi dan kapasitas kelembagaan* masyarakat dengan penekanan pada peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Program ini dirancang dengan menggunakan pendekatan investasi keswadayaan, yaitu *sharing* antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kerjasama ekonomi antara anggota masyarakat, kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah, berkembangnya potensi ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan umum Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Community Capacity Building) adalah mewujudkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kapasitas ekonomi dan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sedangkan secara khusus, program ini bertujuan: (1) Mendorong keterpaduan (sinergitas) kelembagaan ekonomi masyarakat yang ada di desa/kelurahan; (2) Mendorong keterpaduan (sinergitas) keswadayaan dalam bentuk finansial; (3) Mengembangkan pola kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat serta swasta; (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat beserta *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan pembangunan; (5) Mengembangkan keswadayaan masyarakat dalam mengelola kegiatan menuju kemandirian pengelolaan pembangunan.

D. Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan Masyarakat

1. Desa Peradaban

Desa peradaban dalam prespektif pembangunan Jawa Barat, adalah desa yang maju kehidupan lahir batin meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik, peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan kinerja pemerintahan desa. Desa yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial yang sangat memadai seperti “sarana” olahraga, kesehatan”, pendidikan, ibadah, hiburan dan perbelanjaan (Pemda Jabar, 2010: 4).

Tema sentral ini merupakan pemaknaan dari sebuah filosofi bahwa; “Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang beradab, bangsa yang tidak berbudaya adalah bangsa yang tidak beradab” Peradaban (*civilization*): merupakan suatu proses penjabaran nilai-nilai kebudayaan yang diwujudkan dalam norma yang kemudian dijadikan satu tolok ukur kepantasan perilaku bagi warga masyarakat pendukungnya (Supriyoko, 2007).

Peradaban (*civilization*): bagian-bagian dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan santun dan sistem pergaulan yang kompleks dalam suatu masyarakat dengan struktur kompleks (Kuncaraningrat, 1982: 10).

Civilization study is a study of the great cultural heritages especially those dating from the pre Modern citied ages (Hodgson, Marshall G. S, 1974: 30). Sedangkan menurut Yusuf al-Qardlawi, peradaban adalah akumulasi fenomena kemajuan materi, keilmuan, seni, sastra, dan sosial, pada suatu kelompok masyarakat, atau pada beberapa masyarakat yang mempunyai kesamaan (Yusuf al-Qardlawi, 2001: 292). Jadi, penjabaran nilai kebudayaan sekelompok manusia akan menjadi norma peradaban pada kelompok yang bersangkutan. Konklusinya: Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang beradab, bangsa yang tidak berbudaya adalah bangsa yang tidak beradab (Ki Supriyoko, 2007).

Peradaban sebagai proses penjabaran nilai-nilai kebudayaan yang diwujudkan dalam norma yang kemudian dijadikan satu tolok ukur kepantasan perilaku bagi warga masyarakat pendukungnya, sedangkan pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan serta peradaban, karena dalam kegiatan pendidikan terjadi proses pembudayaan nilai-nilai kepada peserta didik. Nilai-nilai yang baik akan menghasilkan peserta didik yang berbudaya baik dan beradab.

Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara, cipta, rasa, dan karsa. Kaclan (2002), menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia (monopluraris secara optimal). Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugrahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi.

Konsep masyarakat adab berasal dari konsep *civil society*, dari asal kata *cociety civilis*, istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Pada mulanya, *civil society* berasal dari dunia barat. Adalah Dato Anwar Ibrahim (mantan wakil perdana menteri malaysia) yang pertama kali memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai istilah lain dari *civil society*. Nurcholish madjid mengindonesiakan *civil society* (inggris) dengan masyarakat madani.

Nurcholis Majid menyebut masyarakat madani sebagai masyarakat yang berperadaban memiliki ciri-ciri, antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan. Toleransi dan pluralisme, serta keterbukaan dan penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Muhamad A.S. Hikam (1990) memberikan definisi *civil society* sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antarlain bersukarelaan (Voluntari), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self sporting), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Shimon Peres (H.A.R. Tilaar, 2000: 47), bahwa dalam peradaban baru ini (era informasi), ada tiga kekuatan yang dominan: (1) ilmu pengetahuan, (2) teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan, (3) informasi. Ketiga kekuatan ini tidak berhubungan lagi secara langsung dengan nasionalitas. Ilmu pengetahuan tidak perlu menyeberangi tapal batas suatu negara dan oleh sebab itu tidak lagi memerlukan paspor dan visa. Demikian pula informasi berembus ke mana-mana tanpa batas dan tidak ada yang dapat menghentikan atau menghambat.

2. Pendidikan Sebagai Pembangunan Peradaban Bangsa

Fungsi Pendidikan dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Ciri masyarakat mandiri merupakan wujud dari peradaban, dapat dipahami dari tumbuhnya masyarakat gemar belajar, dan masyarakat yang mampu menciptakan berbagai peluang

(pendidikan non-formal) di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai potensi, keterampilan dan kecakapannya. Meta konsep *educability* memungkinkan masyarakat (warga belajar) *“fully able to take advantage of any available educational opportunities?”* (Saraka, 2000), lebih giat belajar dan mencari informasi baru yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya.

Peran Pendidikan: (1) pendidikan sangat menentukan penguasaan masyarakat di bidang ilmu dan teknologi. Dengan pendidikan bermutu, penguasaan iptek masyarakat dapat ditingkatkan; (2) Ilmu dan teknologi sangat menentukan perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat. Meningkatnya penguasaan iptek masyarakat akan mengubah perilaku sosial budaya masyarakat; (3) Perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat sangat menentukan peradaban suatu bangsa. Semakin positif, atau negatifnya, perilaku sosial budaya masyarakat membawa kemajuan (atau kemunduran) peradaban bangsa.

Hujair AH. Sanaky, (2003: 4), menjelaskan bahwa, dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang (primitif). Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa di masa mendatang, karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, bahkan M. Natsir menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut.

E. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan

2

Eksistensi Pendidikan Berbasis Masyarakat

A. Perlunya Pendidikan Berbasis Masyarakat

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, harus terbentuk masyarakat yang madani. Masyarakat madani dapat terbentuk jika memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan, semangat berusaha, sekaligus menyiapkan potensi generasi yang siap menghadapi masa depan.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data *United Nation Development Parogramma* (UNDP) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 182 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), ke-109 (1999), dan ke-111 (2009).

Adapun menurut survei yang pernah dikeluarkan *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), dinyatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Realitanya, posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum* Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Masih menurut survei

dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Salah satu indikatornya adalah tidak meratanya pendidikan di setiap daerah, terutama di wilayah pedesaan. Hak mendapatkan pendidikan di desa masih harus terus dikembangkan.

Perbedaan pendidikan kota dan desa memang secara umum berkisar pada masalah sarana dan prasarana sekolah. Sebagaimana diketahui, hal itu menjadi salah satu hal penting kenapa sekolah di kota lebih maju daripada di desa. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan belajar mengajar sangat membantu peserta didik daripada yang sarana dan prasarananya tidak menunjang.

Hal lain yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran untuk memberdayakan pendidikan di desa oleh masyarakat. Ciri desa dengan pola yang kurang dinamis terhadap perkembangan merupakan salah satu hal yang menyebabkan mengapa pendidikan di desa lambat berkembang. Padahal, lingkungan desa yang didiami masyarakat sebetulnya menyimpan potensi yang memberi dampak positif jika masyarakat desa itu sendiri mampu mengembangkan/ mengolahnya. Keadaan ini bisa timbul jika masyarakat desa mempunyai tingkat kesadaran akan daya dan upaya yang dimilikinya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan kecakapan hidup seperti fasilitas pendidikan, informasi, balai latihan, serta fasilitas untuk kegiatan pengembangan pendidikan di desa. Hal ini dikarenakan program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat desa. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah simultan yang bisa membuka pencerahan pada masyarakat desa bahwa pendidikan adalah modal manusia untuk berkembang. Apalagi di zaman sekarang, akses informasi dan transportasi tidak menjadi penghalang utama.

B. Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat

1. Landasan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Landasan pendidikan berbasis masyarakat terdapat pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

- a. Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1);
- b. Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2). Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan 2);
- c. Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah;
- d. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/sekolah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25);

- e. Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/sekolah (pasal 56 ayat 3).

2. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

Menurut Sihombing (Mustikasari 2010), Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan implemementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa PBM adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan.

Konsep pendidikan berbasis masyarakat tertuang juga pada pasal 55 ayat (1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk

kepentingan masyarakat ayat (2) penyelenggaraan pendidikan berbasis mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan. Ayat (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (4) lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumbe daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan implem-entasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, Sihombing, (Effendi 2008). Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian tenaga pendidikan (pihak-pihak terkait) harus melakukan akuntabilitas (pertanggungjawaban) kepada masyarakat. Menurut Sagala, S. (Effendi; 2008), akuntabilitas dapat mengembangkan persatuan bangsa serta menjawab kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat. Pengembangan akuntabilitas terhadap masyarakat akan menumbuhkan inovasi dan otonomi dan menjadikan pendidikan berbasis pada masyarakat (community based education). Untuk mewujudkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dibutuhkan pendidikan yang bermutu. Apabila kita lihat mutu pendidikan di negara kita saat ini masih menghadapi beberapa problematika.

Dalam pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat (PBM) tersebut ada tiga pokok catatan yang perlu menjadi perhatian penerapan tersebut di sekolah: (1) Kemampuan ekonomi masyarakat pendukung sekolah masih lemah; (2) Sekolah terutama sekolah swasta, di naungi oleh yayasan yang acap kali berkultur sangat kaku dan cenderung otoriter. Yayasan berlaku sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan sekolah dalam arti yang luas; (3) Para pengelola sekolah kurang memahami secara mendalam dan luas peran serta fungsi mereka. Jelas bahwa mau tidak mau, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat di nafikan, bahkan keterlibatan mereka menjadi sangat penting demi kemajuan sekolah. Karena peran masyarakat sangat penting dalam pendidikan.

3. Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat

Menurut Compton dan Mc Clusky (Sumpeno, 2009), pendidikan berbasis masyarakat adalah proses di mana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan, mencari solusi mengerahkan daya yang tersedia, dan melaksanakan kegiatan atau pembelajaran, atau keduanya. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu model pendidikan yang mana masyarakat menjadi tumpuan kekuatan pada pendidikan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 butir 38 dijelaskan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat

Dari dua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada kehidupan masyarakat yang mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan dalam kehidupan

dimasyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masyarakat dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan merupakan jawaban terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat merupakan pelaku atau subyek pendidikan yang aktif, bukan hanya sekadar obyek pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka Zubaedi (Sumpeno, 2009).

Beberapa problem mengenai mutu pendidikan kita seperti yang diungkapkan Arief Rahman dan Mukhlisah (Mustikasari, 2010) adalah: (1) Pembiasaan atau penyimpangan arah pendidikan dari tujuan pokoknya; (2) Malproses dan penyempitan simplikatif lingkup proses pendidikan menjadi sebatas pengajaran; (3) Pergeseran fokus pengukuran hasil pembelajaran yang lebih diarahkan pada aspek-aspek intelektual atau derajat kecerdasan nalar.

Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat, meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan masyarakat terhadap sekolah, dan mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan, serta membantu mengatasi putus sekolah terutama dari SD. Sehingga dengan adanya Pendidikan Berbasis Masyarakat, diharapkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi putus sekolah terutama pada SD. Dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat siswa juga diharapkan lebih peka dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar.

Tujuan pengembangan pendidikan berbasis masyarakat ini, adalah sebagai berikut: (1) Membantu pemerintah dalam mobilisasi

sumber daya manusia setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan disemua jenjang, jenis dan jalur Pendidikan; (2) Mendorong perubahan sikap dan persepsi Masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima sosial budaya; (3) Mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan anggota Masyarakat lainnya melalui kebijakan desentralisasi; (4) Mendukung peranan Masyarakat mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mensinergikan dengan peran sekolah, dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, membuka kesempatan lebih besar dalam memperoleh Pendidikan.

C. Prinsip-Prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat

Ciri masyarakat mandiri merupakan wujud dari peradaban, dapat dipahami dari tumbuhnya masyarakat gemar belajar, dan masyarakat yang mampu menciptakan berbagai peluang (pendidikan non-formal) di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai potensi, keterampilan dan kecakapannya. Meta konsep *educability* memungkinkan masyarakat (warga belajar) *"fully able to take advantage of any available educational opportunities"* (Saraka, 2000), lebih giat belajar dan mencari informasi baru yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya.

Mandiri adalah kemampuan memberdayakan diri untuk mengatasi segala permasalahan dan kebutuhan yang dihadapinya dengan segenap potensi dan kemampuan yang ada padanya. Adapun, partisipasi dalam menciptakan desa mandiri pendidikan bisa terdiri dari partisipasi buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Dalam makna yang lebih luas maka tujuan pengembangan desa mandiri pendidikan pada dasarnya adalah pengembangan

demokratisasi, dinamisasi, dan modernisasi masyarakat desa dalam mengakses pendidikan.

Prinsip-prinsip masyarakat desa mandiri pendidikan yang dikemukakan di sini ialah keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri (swadaya dan gotong royong), dan kaderisasi. Prinsip keterpaduan memberi tekanan bahwa kegiatan pengembangan desa mandiri pendidikan didasarkan pada program-program yang disusun oleh masyarakat dengan bimbingan dari lembaga-lembaga yang mempunyai hubungan tugas dalam pembangunan masyarakat.

Prinsip berkelanjutan memberi arti bahwa kegiatan pembangunan desa mandiri pendidikan itu tidak dilakukan sekali tuntas tetapi kegiatannya terus menerus menuju ke arah yang lebih sempurna. Prinsip keserasian diterapkan pada program-program pembangunan desa mandiri pendidikan yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah. Prinsip kemampuan sendiri berarti dalam melaksanakan kegiatan dasar yang menjadi acuan adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri.

Prinsip-prinsip tersebut memperjelas makna bahwa program-program pendidikan nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan pendidikan nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Untuk lebih jelasnya, berdasarkan pendapat Michael W. Galbraith, (Mustikasari 2010), bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Menentukan Sendiri (Self Determination)

Prinsip menentukan sendiri (*Self Determination*) mengandung pengertian bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.

Kesiapan masyarakat dalam belajar dapat diarahkan dengan pemahaman pentingnya pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Dalam hal ini, diperlukan usaha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya pendidikan dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan desa. Hal ini terkait dengan eksistensi serta keberlangsungan hidup dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkelanjutan; baik bagi masyarakat di pedesaan pada khususnya maupun bangsa pada umumnya.

Dengan demikian, masyarakat bisa menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam situasi yang baru. Misalnya, masyarakat bisa mengikuti kegiatan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau mengikuti Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C. Memang, mau tidak mau masyarakat dituntut untuk lebih terbuka pada perkembangan zaman globalisasi ini.

Peranan bidang pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) merupakan salah satu upaya pembangunan dalam memberantas kebodohan dan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, terlebih masyarakat di pedesaan yang tingkat kesejahteraan hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat di sekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan saling

membantu dalam melakukan pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dengan sasarannya yang jelas.

Sinergitas pembangunan karakter (*character building*), hal ini mengandung arti pada satu sisi pendidikan membutuhkan peran masyarakat sebagai media dan sumber pembelajaran, dan pada sisi lain pendidikan juga harus mampu berperan membentuk karakter lulusan pendidikan formal maupun nonformal yang mampu menyumbangkan ilmu, wawasan, keahlian dan sikap diri kepada desa/masyarakat untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian desa yang dijiwai semangat gotong royong.

Semua itu bisa dilakukan jika ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, perlu diberi pemahaman kepada masyarakat bahwa jalur pendidikan yang disediakan oleh pemerintah tidak akan mengandung banyak manfaat jika masyarakat itu sendiri kurang merespons. Ini diperlukan adanya pendekatan dan program khusus sebagai ajang sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat.

2. Prinsip Menolong Diri Sendiri (Self Help)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa anggota masyarakat dilayani dengan baik dalam pendidikan ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian pendidikan dengan lebih baik, bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Salah satu contoh bagian yang bisa diaplikasikan dalam prinsip ini adalah belajar menjadi wirausahawan (*interpreneur*). Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah usaha baru. Dalam memulai dan menjalankan usahanya, ia selalu siap dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian. Hal ini tentunya untuk tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan sumber daya yang diperlukan.

Untuk menunjang hal ini, pemerintah telah menyediakan fasilitas Lembaga Kursus dan Pelatihan, yaitu salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, serta mengembangkan profesi, bekerja, serta usaha mandiri (wirausaha). Program kursus dan pelatihan ini adalah jenis keterampilan yang diselenggarakan satuan pendidikan nonformal, dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang disediakan pemerintah ini rata-rata sudah diakreditasi keberadaannya di setiap daerah. Akreditasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dinyatakan, bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Peserta bisa semakin mudah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan informasi jika ingin membangun suatu bentuk usaha mandiri (wirausaha). Dengan LKP ini peserta dapat bersinergi untuk menemukan dan mengembangkan hal-hal baru. Apalagi anda bisa langsung bertanya pada tutor/pembimbing.

Adapun Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin mengembangkan keterampilan pada jenis pendidikan tertentu dan juga memberikan kesempatan bagi peserta yang

ingin mengembangkan pendidikan keterampilan yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal.

Jika masyarakat mengikuti kegiatan kursus atau pelatihan ini, kecakapan hidupnya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan masyarakat dapat hidup mandiri dalam berwirausaha. Ini artinya, dengan mengikuti kegiatan kursus atau pelatihan, masyarakat akan menemukan manfaat lebih, yaitu: (1) Belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*); (2) Belajar untuk tahu cara belajar (*learning to learn*); (3) Belajar untuk dapat berbuat/melakukan pekerjaan (*learning to do*); (4) Belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan minat, bakat dan potensi diri (*learning to be*); (5) Belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain (*learning to live together*).

Kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan masyarakat mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam berwirausaha secara lebih efektif. Kecakapan hidup hidup masyarakat dalam berwirausaha akan sesuai kelayakan dengan adanya: (1) kecakapan mengenal diri, (2) kecakapan berpikir, (3) kecakapan sosial, (4) kecakapan akademik, dan (5) kecakapan kejuruan.

3. Prinsip Pengembangan Kepemimpinan (Leadership development)

Dalam prinsip ini, para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat. Ketika peran pemerintah sangat dominan dan peran serta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan dari proses pembangunan itu sendiri. Penguatan partisipasi masyarakat

haruslah menjadi bagian dari agenda pembangunan itu sendiri, lebih-lebih dalam era globalisasi.

Peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pendidikan harus lebih dimaknai sebagai hak daripada sekadar kewajiban. Kontrol rakyat (anggota masyarakat) terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan penyelenggaraan pendidikan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol agenda dan urutan prioritas pendidikan untuk dirinya atau kelompoknya. Oleh karena itu, tidak akan dapat diterima jika satu golongan (misalnya tokoh masyarakat) mendiktekan keinginan dan kepentingannya dalam isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Seiring perkembangan zaman, titik pusat perhatian adalah pada pendekatan ke arah pendidikan yang lebih berpihak kepada rakyat. Individu bukanlah sebagai objek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.

Penyelenggaraan pendidikan yang memihak rakyat menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan pendidikan seperti itu mementingkan sistem organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya. Tingkat pengetahuan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pendidikan yang memihak rakyat. Dalam hal ini, perasaan berharga diri adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi melalui pendidikan.

Penyadaran diri masyarakat merupakan satu di antara argumen-argumen yang diajukan oleh Paulo Freire (1984), dan ini adalah inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala rakyat diubah ke arah suatu kesadaran, perasaan, pemikiran, dan gagasan bahwa hal-hal dapat menjadi lain dan tersedia alternatif-alternatif melalui pendidikan.

Bentuk aktualisasi dan pernyataan penyadaran diri masyarakat terhadap pendidikan secara kolektif dapat berupa partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya dan kelompoknya dalam komunitas yang melingkupinya. Cara-cara kolektif berpartisipasi oleh masyarakat bisa teraktualisasikan dalam bentuk musyawarah dan juga terbentuknya institusi lokal oleh masyarakat itu sendiri.

Musyawarah adalah sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah juga merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki atas keputusan dan rencana pembangunan. Musyawarah merupakan cara analisis kebutuhan (needs) dan tidak sekadar keinginan yang bersifat superfisial demi pemenuhan kebutuhan sesaat. Oleh karena itu, pemilihan orang-orang yang mewakili sebagai peserta musyawarah untuk suatu keperluan seperti merumuskan kebutuhan masyarakat haruslah benar-benar yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Langkah lain dalam proses partisipasi masyarakat itu adalah pembentukan kelompok. Melalui kelompok akan dibina solidaritas, kerja sama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri (Karsidi, 2001). Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok adalah melalui pendekatan kepentingan yang sama secara primordial. Dalam kelompok primordial itu, para anggota kelompok akan memperoleh referensi yang sama.

Dengan bertolak dari kelompok primordial, maka para anggota akan merasakan adanya hal-hal baru jika mereka bersedia membandingkannya dengan situasi lama. Ini akan menimbulkan keasikan dan motivasi tersendiri. Melalui kelompok, para anggota akan menyusun program, dan bekerja secara sistematis, serta bisa merasakan adanya perkembangan dan kemajuan sebagai hasil kegiatan mereka. Para pemimpin yang ada di desa bisa dijadikan sebagai mediator suara masyarakat dengan program yang

dijalankan pemerintah. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, konsep musyawarah adalah solusi terbaik untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di desa.

4. Prinsip Lokalisasi (Localization)

Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup. Hal ini dilatarbelakangi bahwa bangunan seluruh aspek penentu perubahan negara ini dapat dipastikan tidak lepas dari proses pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam aspek ekonomi, politik, kelautan, pertanian, pertahanan, dll. Semua akan berhasil tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan, apabila didukung dengan konsep pendidikan yang mengarah pada penguatan untuk perubahan yang mengarah perbaikan dan kemajuan pada aspek-aspek tersebut.

Disinilah peran signifikan pendidikan dalam berkontribusi membangun sistem pendidikan berbasis lokalitas. Peran tersebut diwujudkan dengan terbentuknya sistem pendidikan nasional yang mengarah pada pemberdayaan potensi lokal Indonesia, misalnya pendidikan berbasis maritim, agraris, dan ciri khas lokal lainnya, sehingga memperkuat budaya dan potensi lokal yang dapat menopang perkembangan dan kemajuan pendidikan.

Potensi terbesar tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup. Pendidikan yang lebih dimaknai dan bersifat membumi adalah ketika pendidikan itu dekat dengan kondisi dan lingkungan warga belajar.

Salah satu contohnya adalah dengan penggunaan bahasa ibu dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Dengan menggunakan

bahasa ibu dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan nonformal, sekaligus dapat melestarikan bahasa ibu guna memperkaya kebudayaan nasional. Pengalihan lintas bahasa dapat terjadi secara dua arah. Dalam hal ini, jika bahasa ibu dipromosikan di sekolah nonformal, konsep kemampuan berbahasa dan keterampilan keaksaraan yang dipelajari oleh warga belajar dalam bahasa ibu mereka. Singkatnya, kedua bahasa itu bisa saling terpelihara jika lingkungan pendidikan mendukung warga belajar untuk menggunakan dua bahasa.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tanggung jawab pengembangan pendidikan sebagai proses sosialisasi adalah berada pada orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan. Paradigma pengembangan lokalitas tersebut telah bergeser menuju kepada peluang yang lebar bagi teraktualisasikannya kembali partisipasi masyarakat, maka perlu segera dilakukan upaya pemulihan dan pengembalian tanggung jawab masyarakat terhadap pengembangan pendidikan baik yang berbasis kekayaan lokalnya masing-masing. Sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah justru masyarakat itu sendiri. Mengacu pada lingkup partisipasi masyarakat, maka dalam pengembangan pendidikan, masyarakat harus dilibatkan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasinya.

5. Prinsip Keterpaduan Pemberian Pelayanan (Integrated Delivery of Service)

Dalam prinsip ini terkandung pengertian adanya hubungan antara gensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat pedesaan yang terberdayakan sebagai hasil pendidikan yang baik dapat memiliki nilai tambah dalam kehidupan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Dengan demikian, peranan

pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar dan haruslah terpenuhi bagi masyarakat pedesaan dalam manfaat lainnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan. Dalam kasus yang terjadi, pembangunan yang menggerus sektor ekonomi, misalnya, dapat tergantikan dengan jenis usaha baru yang membuat masyarakat bertahan.

Cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau komunitas tempat masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada. Kondisi ini menuntut kesigapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dari pihak masyarakat (termasuk orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat) juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 2003, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia tujuh sampai usia lima belas tahun. Lebih dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua/warga dan kelompok masyarakat masih sangatlah luas.

Untuk itu, maka dalam kondisi kualitas layanan dan output pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

3

Pendidikan Non Formal Memberdayakan Masyarakat (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat)

A. Perlunya Pendidikan Non Formal

Pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat dari *skill* masyarakat Indonesia kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pengembangan masyarakat (*community development*) dan pengembangan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).

Pertama-tama perlu dipahami arti dan makna pemberdayaan masyarakat, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar memiliki kesehatan fisik dan mental, serta didik dan kuat *inovatif*, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi, sedangkan pembangunan masyarakat adalah suatu hal yang perlu di minij untuk kemampuan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita dalam yang dalam kondisi sekarang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, hingga muncul perubahan yang lebih

efektif dan efisien.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, dan akses ke pasar dan kedalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi pendidikan dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan yang nyata. Untuk merumuskan kenyataan tersebut negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu melaksanakan dan menjabarkan rumusan-rumusan kebijakan publik (Public Policies) dengan baik untuk mencapai tujuan yang di kehendaki.

B. Makna Hakiki Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa

pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*," yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Payne (1997), menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Istilah pemberdayaan masyarakat atau *empowerment* merupakan istilah yang diangkat dari hasil penelitian seorang sarjana pendidikan nonformal Suzanne Kindervatter dalam bukunya *Nonformal as An Empowering process*, memiliki makna agar orang-orang yang diberdayakan itu mempunyai "daya" atau mempunyai kemampuan untuk hidup layak sama dengan temannya sesama manusia. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara hak dan kewajiban, menjadi warga negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia menuju masyarakat yang memahami akan hak, kewenangan dan tanggungjawab mereka dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Chambers (Kartasasmita, 1996: 142) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yakni bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable*. Pengertian lain yang disampaikan oleh Tjokrowinoto (Kusnadi, 2006: 219) konsep ini

lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (basic need) akan tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety need). Sumodingrat (1996: 185) menyatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh

pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*".

Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "*incompatible or antithetical*". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game*" dan "*trade off*". Ia bertolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta

landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), *"the pattern of growth is just as important as the rate of growth"*. Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, *"the right kind of growth"*, yakni bukan yang vertikal menghasilkan *"trickle-down"*, seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni *"broadly based, employment intensive, and not compartmentalized"* (Ranis, 1995).

Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Hal terakhir ini besar artinya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.

Pengalaman Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan beriringan. Taiwan adalah salah satu negara dengan tingkat kesenjangan yang paling rendah ditinjau dengan berbagai ukuran (tahun 1987, Gini rasionya 0,30, termasuk yang terendah di dunia), tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dapat dipeliharanya secara berkelanjutan (Brautigam, 1995). Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

1. Menciptakan Suasana atau Iklim yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Berkembang (Enabling).

Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat Potensi atau Daya yang Dimiliki oleh Masyarakat (Empowering).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungan adalah bagian pokok dari upaya

pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan *“The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning”*.

3. Memberdayakan

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

a. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut Yunus (2004: 3) ada lima prinsip dasar yang patut diperhatikan: (1) keperdulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi/sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan dan (5) mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.

b. Ciri-Ciri Pemberdayaan

Agar proses pembelajaran yang dilakukan melalui Pendidikan Luar Sekolah, dapat terjadi proses pemberdayaan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Need oriented, yaitu pendekatan yang berorientasi dan didasarkan pada kebutuhan warga masyarakat; *Endegenious*, yaitu pendekatan yang berorientasi dan mengutamakan kesesuaian nilai-nilai keaslian lokal, dengan cara menggali dan menggunakan potensi yang dimiliki warga belajar; *Self reliant*, yaitu pendekatan yang membangun rasa percaya diri atau sikap mandiri pada setiap warga masyarakat; *Ecologically sound*, ialah pendekatan yang berorientasi, memperhatikan dan mempertimbangkan aspek perubahan lingkungan dan; *Based on structural transformation*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada perubahan struktur sistem, baik yang menyangkut hubungan sosial, kegiatan ekonomi, penyebaran keuangan, sistem manajemen maupun partisipasi masyarakat setempat.

D. Pendekatan, Metodologi dan Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendekatan-pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan praanggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi masalah kesenjangan. Kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan itu (Brown, 1995). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai *input* seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok. *Pertama*, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (acceptable); *kedua*, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable); *ketiga*, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable); *keempat*, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (sustainable); dan *kelima*, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (replicable).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: *Pertama*, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental. Dalam pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Dengan pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi

pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, di mana penasihat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut.

Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumber daya tidak sama (Catanese and Snyder, 1986). Kemajemukan atau *pluralisme* inilah yang perlu dipahami. Menurut paham ini kegagalan pemerintah sering terjadi karena memaksakan pemecahan masalah yang seragam kepada masyarakat yang realitanya terdiri dari kelompok-kelompok yang beragam. Ketidakpedulian terhadap heterogenitas masyarakat, mengakibatkan individu-individu tidak memiliki kemauan politik dan hanya segelintir elit yang terlibat dalam proses pembangunan.

Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai salah satu bentuk “penyadaran” secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

2. Metodologi Evaluatif dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman tentang masalah pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap subyektif dalam penelitiannya. Subyektifitas ini bertolak dari sikap dasar, bahwa setiap penelitian tentang suatu masalah sosial selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, untuk meluruskan ketimpangan yang ada. Dan, bukan hanya untuk sekedar melukiskan serta menerangkan kenyataan yang ada (Buchori, 1993).

Tidak ada penelitian sosial yang akan dapat mendatangkan perbaikan terhadap kondisi sosial yang ada selama para peneliti menempatkan diri mereka sebagai pakar yang berdiri di luar kenyataan sosial yang diteliti, dan memperlakukan warga masyarakat yang sedang diteliti sebagai obyek yang hanya menjalani kenyataan sosial yang ada secara pasif. Para peneliti harus menempatkan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang sedang diteliti dan memandang warga masyarakat yang sedang diteliti sebagai subyek yang mempunyai hak moral untuk mengatur kehidupan mereka, serta mempunyai keinginan dan kemampuan untuk berbuat demikian.

Dalam kerangka ini, menjadi kewajiban moral para peneliti untuk memahami aspirasi masyarakat yang diteliti, dan mendampingi secara mental dan intelektual warga masyarakat yang diteliti dalam usaha mereka untuk mendatangkan perbaikan yang mereka dambakan. Dengan demikian, dalam penelitian semacam ini masalah penelitian tidak dapat dipisahkan dari masalah evaluasi. Keputusan untuk meneliti suatu masyarakat dengan tujuan untuk mendatangkan perbaikan ke dalam masyarakat itu, melalui antara lain pemberdayaan masyarakat, sudah merupakan suatu hasil evaluasi.

Untuk melaksanakan evaluasi apakah proyek yang telah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu telah sungguh mendatangkan perbaikan yang sesuai dengan harapan warga masyarakat, perlu dilakukan suatu penelitian. Dua metoda penelitian

evaluatif yang bersifat *bottom-up* adalah *rapid rural appraisal* (RRA), dan participatory rural appraisal (PRA).

a. Metoda *Rapid Rural Appraisal* (RRA)

Metoda RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metoda RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (development agent) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Menurut James Beebe (1995), metoda RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metoda ini bertujuan untuk menghasilkan

pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Metoda RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

b. Metoda *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metoda PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

Kritik PRA terhadap pembangunan adalah bahwa program-program pembangunan selalu diturunkan “dari atas” (*top down*) dan masyarakat tinggal melaksanakan. Proses perencanaan program tidak melalui suatu ‘penjajagan kebutuhan’ (*need assesment*) masyarakat, tetapi seringkali dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survei, studi atau penelitian formal yang dilakukan oleh petugas atau lembaga ahli-ahli penelitian. Akibatnya program tersebut sering tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak adanya rasa memiliki terhadap program itu. Dengan PRA, yakni dengan partisipasi masyarakat keadaan itu diperbaiki dan juga keterampilan-keterampilan analitis dan perencanaan dapat dialihkan kepada masyarakat. Dengan demikian secara bertahap ketergantungan pada pihak luar akan berkurang dan pengambilan prakarsa dan perumusan program bisa berasal dari aspirasi masyarakat (*bottom up*).

Metoda PRA didasarkan pada penyempurnaan dan modifikasi dari metoda AEA (*Agroecosystems Analysis*) dan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) yang dilakukan oleh kalangan LSM dan peneliti yang bekerja di wilayah Asia dan Afrika. Walaupun ada beberapa kesamaan antara metoda PRA dan RRA, tetapi ada perbedaan

4

Konsep Pendidikan Non Formal

A. Perlunya Konsep Pendidikan Non Formal

Salah satu agenda utama bagi pembangunan nasional adalah sektor pendidikan. Melalui pendidikan negara dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berimplikasi pada kemajuan di berbagai bidang kehidupan lainnya, seperti: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itulah pemerintah harus memenuhi hak setiap warga dalam memperoleh layanan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pendidikan tidak hanya berperan besar dalam kemajuan bangsa, melainkan juga berkaitan dengan pasar bebas yang semakin kompetitif, pendidikan hendaknya dipandang dapat mengakomodir masyarakat agar suatu negara memiliki manusia-manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kaya akan pengetahuan teoritis melainkan juga praktis, penguasaan teknologi, dan memiliki keahlian khusus. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengevaluasian dan peningkatan pendidikan di setiap negara secara berkesinambungan.

Melihat sedemikian penting peranan pendidikan, kemunculan pendidikan non formal dapat dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsep awal dari Pendidikan Non Formal ini muncul sekitar akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an dalam bukunya Philip Coombs dan Manzoor A., P.H. (1985) *The World Crisis In Education*. Menurut

Coombs (1974), pendidikan non formal adalah:

“Any organized, systematic educational activity outside the framework of the formal (school) system (designed) to provide selective type of learning particular sub-groups in the population adult, as well as children”.

Kehadiran pendidikan non formal marak di awal-awal tahun 1970-an terutama disebabkan oleh adanya kebutuhan akan pendidikan yang begitu luas terutama di negara-negara berkembang. Meluasnya kebutuhan akan pendidikan tidak terimbangi dengan ketersediaan pendidikan disebabkan adanya kegagalan pendidikan formal. Sebagaimana diungkapkan oleh Paulston dan Le Roy (1972: 338) “bahwa pendidikan formal mengalami kegagalan logistik dan fungsi sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang begitu besar dan cepat maka munculah sistem pendidikan alternatif di luar pendidikan formal”.

Pendidikan nonformal, yang juga dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai istilah menurut perkembangannya, yaitu: Pendidikan Masyarakat (Penmas), Pendidikan Sosial (Pensos), dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), merupakan institusi atau lembaga pendidikan yang memiliki program layanan pendidikan yang luas dan kaya serta spesifik sebagai perwujudan implementasi tentang filsafat pendidikan sepanjang hayat (life long learning).

Dengan pendidikan sepanjang hayat, secara sosiologis, psikologis, ekonomis, dan filosofis baik di negara maju maupun negara berkembang kenyataannya sangat membutuhkan PLS yang saat ini lebih dikenal dengan pendidikan nonformal (PNF), karena memang dalam menghadapi pembangunan bangsa dan berbagai permasalahannya, tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan persekolahan atau pendidikan formal (PF) yang ternyata masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan dan kritik terhadapnya (Sudjana, 2004, Coombs 1985, Illich, 1982, Freire, 1972).

PNF dalam perkembangannya memiliki sejarah yang panjang sepanjang sejarah peradaban manusia (Sudjana, 2000) sehingga istilah PNF sangat beragam, misalnya: *“learning society, lifelong learning, shogai gakushu, recurrent education, permanent education, coommunity education, extention education, social education, adult education, dan continuing education”* (Sudjana, 2004, Kamil, 2009). Pokok kajian keilmuan Pensos pada saat itu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, dan kajian ini sangat dekat dengan konsep pembangunan masyarakat yang dikembangkan para pakar pembangunan dalam perspektif sosiologi. Perubahan konsep Pensos menjadi PLS juga tidak lepas dari pemikiran pakar PNF pada saat itu, di mana arah pembangunan pendidikan lebih ditekankan pada proses pembelajaran masyarakat sehingga tercipta masyarakat gemar belajar (*learning society*). Sedangkan perubahan nama PLS menjadi Pendidikan Nonformal (PNF) mengikuti perkembangan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pada pasal 1 (satu) ayat 10 disebutkan tentang satuan pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal dan informal.

B. Konsep Dasar Pendidikan Nonformal

1. Pengertian Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal (PNF) atau yang juga populer dengan sebutan pendidikan luar sekolah (PLS) sebelum Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengikuti konsep Philip H Coomb yaitu: *Any organized educational activity outside the established formal system wether operating separately or as an impor tant feature of some broader activity that it ntended to serve identiviable clientels and learning objectives* (Coombs, 1973). Selanjutnya Coombs dan Ahmad mendefinisikan PNF *is any organized, systematic, educational activity carried on outside the framework of the formal system to provide selected types of learning to*

particular subgroups in the population, adults as well as children (Rogers, 2005:78).

Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari aktifitas yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani belajar peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal melayani pendidikan kepada masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak. Untuk memahami konsep PNF secara lebih jelas perlu memahami perbedaan antara pendidikan nonformal dengan pendidikan formal. Pada prinsipnya antara keduanya yaitu PF dan PNF bukan berbeda secara dikotomis, tetapi berbeda secara kontinum dan perbedaan itu dalam hal tingkat keterorganisirannya.

Simkins (1976) membedakan dari sisi tujuannya, waktu, isi, sistem penyampaian, dan kontrol. Dari segi tujuan, PF bersifat jangka panjang dan untuk perolehan ijazah sedang PNF lebih jangka pendek dan spesifik dan kurang berorientasi ijazah. Dari sisi waktu, PF programnya lebih lama dan menjadi dasar bagi program untuk tingkat berikutnya, merupakan persiapan untuk masa depan yang panjang dan waktunya full time, sedang PNF waktunya lebih pendek tergantung tujuan yang akan dicapai dan bukan persiapan untuk hidup tetapi tergantung kebutuhan baik untuk orang dewasa maupun anak-anak, dan bersifat part time.

Dari segi isi program, PF biasanya lebih bersifat akademik sedang PNF isi programnya lebih bersifat praktis dan berguna dalam kehidupan langsung. Dari sisi sistem penyampaian, perbedaannya PF lebih berorientasi pada kelembagaan, programnya kurang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar, lebih berorientasi pada guru, penggunaan sumber lebih intensif, sedang PNF lebih berorientasi pada lingkungan, programnya juga berkaitan langsung dengan kebutuhan lingkungan, berorientasi pada warga belajar, lebih hemat dalam pembiayaan. Perbedaan terakhir adalah

dalam hal control dan evaluasi, PF evaluasi dilakukan oleh pihak di luar diri siswa, sedang PNF evaluasi ditekankan pada evaluasi diri dan lebih bersifat demokratis.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa definisi pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adapun fungsinya ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Bila dilihat dari lingkupnya, pendidikan nonformal dalam konteks pendidikan luar sekolah yang berkembang di dunia internasional, banyak istilah yg mengacu pada pengertian pendidikan nonformal, antara lain: *permanent education*, *life long education*, *recurrent education*, *community education*, *extension education*, *continuing education* (Sudjana, 1991:11). Disamping itu juga ada *adult education* atau pendidikan orang dewasa yaitu usaha pendidikan pada umumnya yang dilakukan dengan kemauan sendiri (orang dewasa) termasuk pemuda di luar masa batas tertinggi kewajiban belajar di luar lingkungan sekolah (Yusuf, 1979).

Pendidikan orang dewasa bisa diklasifikasi menjadi 5 jenis yaitu: (1) pendidikan lanjutan yaitu kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat pemuda yang perlu mendapatkan pendidikan secukupnya menjelang memasuki gerbang kehidupan dewasa dengan memberi satu atau beberapa keahlian atau pengetahuan yang bersifat umum sebagai alat untuk mencari nafkah. (2) Pendidikan pembaharuan yaitu pendidikan yang diberikan kepada orang yang sudah melampaui masa pemuda agar

memperoleh kedudukan dalam kerja, (3) pendidikan kader yaitu pendidikan yang berupa latihan atau kursus yang diselenggarakan oleh organisasi atau perkumpulan baik yang berkecimpung dalam dunia politik, ekonomi atau hiburan dan bertujuan untuk kemajuan organisasi, (4) pendidikan populer yaitu kegiatan pendidikan yang ditujukan kepada semua orang agar dapat memanfaatkan waktu senggangnya dengan baik dan memberikan aktivitas tertentu yang berguna dan bertujuan untuk pemenuhan hasrat orang untuk mencari perubahan dan variasi hidup. (5) Pendidikan kehidupan keluarga atau *family life education* yaitu pendidikan yang kegiatannya secara khusus berkenaan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarga yang bertujuan memperkaya dan memperluas pengalaman anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam keluarga sebagai satu kesatuan kelompok.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori konflik, Samuel Bowles dan Gintis (1976): Peran utama pendidikan adalah menghasilkan tenaga kerja. Kurikulum yang ada didesain sedemikian rupa (*hidden curriculum*) sehingga memiliki korelasi dengan kebutuhan yang ada di dunia industri. Dengan kata lain pendidikan adalah lembaga penting dalam men-supply kebutuhan kapitalisme. Pendidikan menyiapkan murid-muridnya untuk mengabdikan pada sistem perekonomian kapital atau industri. Lembaga Pendidikan yang lebih elit akan mendapatkan informasi dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Sehingga bagi kelas atas mereka memiliki fasilitas dan pengetahuan diluar sekolah lebih banyak.

Oleh karena itu pendidikan menjadi sarana bagi kaum kapitalis untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan produksinya. Bowles dan Gintis melihat bahwa pendidikan secara tidak langsung menguntungkan bagi kapitalis melalui *legitimation of inequality*. Bowles dan Gintis melihat meskipun

pendidikan terbuka untuk siapa saja, tetapi beberapa orang memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Anak orang kaya dan berkuasa cenderung untuk memenuhi kualifikasi dan penghargaan yang tinggi untuk kemampuan kerja.

Sedangkan Glenn Rikowski dalam paradigma konflik menyatakan bahwa: (1) Rikowski melihat pelayanan pendidikan bertransformasi menjadi komoditi dengan tujuan pertambahan nilai surplus-profit atau keuntungan. Dorongan terbesar dalam pendidikan adalah menciptakan keuntungan dari sistem ini. Pendidikan sebagai komoditi yakni pendidikan beroperasi seperti perusahaan komersil. (2) Ekspansi pasar yang konstant adalah kepentingan atau kebutuhan untuk pembangunan kapitalisme. Sehingga kecenderungan kapitalis adalah membuat pasar global. Jadi menurut Rikowski, globalisasi yang terjadi sekarang adalah globalisasi kapitalis dan pendidikan termasuk dalam proses tersebut. Dan sekolah tidak dapat melawan kepentingan fundamental kepentingan kapitalis.

Menurut Theodore Schultz dalam teori Human Capital:

"The process of acquiring skills and knowledge through education was not to be viewed as a form of consumption, but rather as a productive investment 'by investing in themselves people can enlarge the range of choice available to them. it is the one way freemen can enhance their welfare'" jika seseorang mengikuti pendidikan, maka Ia berinvestasi terhadap dirinya sendiri, karena pendidikan yang telah Ia dapatkan akan membuatnya lebih kompeten untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

C. Program dan Satuan Pendidikan Nonformal

1. Program Satuan Pendidikan Non Formal

Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan nonformal meliputi: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim, serta satuan pendidikan

lain yang sejenis. Beberapa istilah tentang satuan pendidikan nonformal mungkin sudah familier di masyarakat, namun terdapat satu satuan pendidikan yang perlu dijelaskan dalam konsep satuan PNF tersebut, yaitu PKBM.

PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat (Sihombing, 2001). Pengertian lain dikemukakan oleh Kamil (2009) yang dirujuk dari konsep UNESCO bahwa PKBM merupakan salah satu wadah dalam memberikan kesempatan penuh kepada seluruh komponen masyarakat agar mampu: (a) memberdayakan masyarakat, (b) meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan (c) pengembangan dan pembangunan masyarakat.

Sedangkan program PNF menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi beberapa program, sebagai berikut: (a) pendidikan kecakapan hidup (life skills), (b) pendidikan anak usia dini, (c) pendidikan kepemudaan, (d) pemberdayaan perempuan, (e) pendidikan keaksaraan, (f) pendidikan keterampilan, dan (g) pendidikan kesetaraan.

Konsep lain dikemukakan oleh Patricl Boyl bahwa program PNF terdapat tiga jenis, yaitu: *developmental*, *institutional*, dan *informasional* (Boyle, 1981). Program Pengembangan (developmental Program) ialah upaya PNF yang dimaksudkan untuk membantu suatu masyarakat atau kelompok sosial dalam mengenali dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Ini dilakukan jika di dalam sistem sosial terdapat suatu masalah yang perlu dipecahkan atau suatu perbaikan yang perlu dilakukan, dan anggota masyarakat tersebut perlu digerakkan untuk melakukan tindakan nyata (kongkrit). Bentuk kegiatannya bisa berupa: (1) aksi sosial misalnya gotong royong, bakti sosial, dll, (2) pengorganisasian masyarakat misalnya dibentuk koperasi, kepanitiaan, dll.

Sedangkan program institusional (Institutional program) atau training ialah upaya pendidikan yang diberikan kepada perorangan

dengan tujuan penguasaan kemampuan-kemampuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lapangan kerja atau di masyarakat.

Program ini berupa: (1) tindak lanjut dari program informasi-nal misalnya setelah mengetahui adanya teknologi baru, ingin belajar menggunakannya, dan (2) pemberian keterampilan baru sama sekali. Adapun program penyuluhan (Informasional program), yaitu upaya PNF yang bertujuan untuk menyebarkan informasi baru yang penting bagi masyarakat atau kelompok sosial dalam rangka peningkatan taraf hidup dan perbaikan lingkungan. Informasi tersebut berupa: perundang-undangan, penemuan baru, peraturan atau kebijakan baru, dan sebagainya yang perlu diketahui oleh seluruh warga negara.

2. Program Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Program layanan pembinaan pendidikan yang dikembangkan pada PNF, antara lain adalah:

- a. Pendidikan keaksaraan adalah komitmen internasional yang tertuang dalam deklarasi Dakkar yang mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di masing-masing negara anggota UNESCO pada tahun 2015.
- b. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal bagi warga Negara Indonesia usia sekolah atau yang telah melewati batas usia sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Taman Kanak-kanak (disingkat TK) jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Kelompok bermain (bahasa Inggris: playgroup) merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima tahun. Kelompok bermain umumnya beroperasi sampai siang hari saja, dan memiliki staf suster anak atau sukarelawan. Kelompok bermain dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik untuk mengembangkan intelegensi, kemampuan sosial, dan kematangan motorik anak.

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuh dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun

Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Berfungsi memberikan pendidikan sejak dini & membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup,

5

Karakteristik Kemandirian Dalam Pendidikan Non Formal

A. Perlunya Memahami Karakteristik Kemandirian dalam Pendidikan Non Formal

Agar Masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan potensinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka peran pendidikan nonformal sangat strategis. Pendidikan Luar sekolah, atau pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapam, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya (Coombs, dalam Sudjana, 2000: 23).

Program pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia diri, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

B. Karakteristik Kemandirian dalam Pendidikan Non-formal

Seperti diuraikan pada bab terdahulu pendidikan nonformal memiliki ciri yang berbeda dengan pendidikan formal (sekolah)

baik dilihat dari: program yang dikembangkan, sasaran didik, kondisi sumber belajar, kurikulum, model pembelajaran, tujuan pembelajaran maupun model evaluasi yang harus dikembangkan dalam program pendidikan nonformal.

Akan tetapi untuk mendukung keberhasilan realisasi dari faktor-faktor tersebut ada beberapa karakteristik dasar yang harus menjadi patokan dan harus dijadikan pegangan bagi tutor, fasilitator, *provider* dalam mengembangkan pendidikan nonformal diantaranya adalah: (1) Kompetensi yang dikembangkan, (2) Peningkatan kemandirian dalam proses pembelajaran, dan (3) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan program PNF.

1. Kompetensi yang Dikembangkan Dalam Pendidikan Nonformal

Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan nonformal seyogyanya dibangun atas dasar kesepakatan dan kebutuhan peserta didik. Namun demikian jika dilihat dari kondisi sasaran pendidikan nonformal variasi kurikulum yang dikembangkan dan kompetensi yang ditetapkan harus menjadi pemahaman tutor, fasilitator atau *provider* (pengembangan pendidikan nonformal). Sehingga ketika program pendidikan nonformal dikembangkan mereka mengerti tentang apa yang akan diberikan dan apa yang harus dimiliki (dicapai) peserta didik. Oleh karenanya pemahaman tentang konsep dasar pengembangan kurikulum *flexible*, pemahaman kompetensi, dan keterampilan bagaimana caranya menggali dan menetapkan kebutuhan sasaran didik adalah merupakan faktor dominan yang harus menjadi acuan.

Beberapa catatan utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan nonformal (*provider*) berkaitan dengan pengembangan kurikulum diantaranya adalah: (a) Kondisi peserta didik; (b) Kondisi sumber belajar (tutor, dan infrastruktur lainnya), (c) Lingkungan masyarakat dimana program pendidikan nonformal akan dikembangkan, (d) Daya dukung lain seperti pemerintah,

tokoh masyarakat dan lembaga organisasi masyarakat (NGO), (e) kemampuan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan program.

a. Apa Yang Harus Diperhatikan dengan Kondisi Peserta Didik

Ketika kurikulum pendidikan nonformal akan dikembangkan perhatian pertama yang perlu dijadikan acuan adalah kondisi peserta didik, alasannya adalah; karena peserta didik pendidikan nonformal memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan pendidikan lainnya (formal atau sekolah). Beberapa faktor yang dapat dijadikan patokan diantaranya adalah:

Pertama: Usia peserta didik pendidikan nonformal sangatlah bervariasi, hal ini tergantung pada program yang akan dikembangkan. Misalnya program pendidikan kesetaraan (equivalency education). Usia peserta didik pendidikan kesetaraan adalah anak usia sekolah 13–24 tahun. Yang karena berbagai hal mereka tidak memperoleh pendidikan sekolah karena: (1) *drop out* sekolah formal (drop out SD, SMP atau SMA), (2) kemiskinan, sehingga mereka tidak bisa sekolah (orang tua tidak bisa membayar anaknya untuk sekolah), (3) masyarakat tidak bisa mengakses sekolah karena masyarakat tinggal di pedalaman, kepulauan atau tempat-tempat terpencil lainnya seperti di kepulauan-kepulauan di Indonesia, atau di daerah perbatasan, atau masyarakat yang termarginalkan seperti anak-anak pemulung, pengamen atau peminta-minta, (4) pendidikan nonformal merupakan pilihan masyarakat (masyarakat merasa tidak cocok dengan pendidikan formal) seperti pada program komunitas home schooling atau kelompok masyarakat sekolah rumah, atau kelompok masyarakat yang memilih pendidikan nonformal sebagai suplemen pendidikan sekolah seperti: kursus seni musik, seni tari, melukis, kursus Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, kursus matematik, computer dan lain-lain yang diselenggarakan setelah jam sekolah dan diikuti oleh peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan formal (sekolah).

Program lain seperti pelatihan dan kursus baik dalam bentuk *inservice training* atau *free service training* atau kursus keterampilan vocational terbuka lainnya dalam bentuk magang (*on the job training*) biasanya diikuti oleh orang dewasa yang memiliki usia di atas 18 tahun atau setamat pendidikan sekolah formal. Kegiatan pelatihan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh pekerjaan, atau menambah (meningkatkan) keterampilan untuk menunjang pekerjaannya.

Kondisi usia sasaran pendidikan nonformal itulah yang harus menjadi patokan utama, karena jika pengembang pendidikan nonformal tidak memahami betul kondisi usia sasaran. Maka program yang dikembangkan akan tidak bermakna dan tidak menjadi pilihan peserta didik.

Pengembang pendidikan nonformal sering kali lupa, ketika proses penyusunan materi pembelajaran dan ketika model atau metoda pembelajaran akan diberikan baru sadar bahwa sasaran didiknya bervariasi tidak homogen akan tetapi heterogen. Pada saat itulah kemampuan dan keterampilan tutor sebagai orang pertama yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan program dan keberhasilan program dituntut untuk terampil dan mampu untuk merubah pendekatan pembelajaran, model pembelajaran atau metoda pembelajaran yang akan dilakukan. Kompetensi-kompetensi inilah yang harus dimiliki tutor dan fasilitator dalam hal proses pembelajaran pendidikan nonformal.

Kedua. Pengalaman, seringkali kita ingat tentang teori pendidikan orang dewasa, bahwa sasaran pendidikan non formal adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman (karena mereka sudah dewasa). Tidak demikian dengan sasaran pendidikan kesetaraan sekolah dasar paket A dan pendidikan anak usia dini dalam pendidikan non formal. Di mana usia peserta didiknya rata-rata di bawah 14 tahun. Kondisi ini harus menjadi catatan utama pengembang pendidikan nonformal ketika akan menyusun kurikulum.

Ketiga. Kompetensi, Seperti disarankan Ella Yulaelawati (2003), fokus kurikulum yang bermuatan kompetensi adalah: pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dimiliki dan akan dikembangkan oleh peserta didik sebagai hasil belajarnya disertai dengan keseluruhan sistem standar mutunya. Dengan mengembangkan kompetensi dalam kurikulum diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mampu belajar sendiri; (2) Membolehkan peserta didik menggunakan pengetahuan, alatan dan bahan lain sebagai sumber belajar; (3) Membolehkan peserta didik membuat refleksi dan menilai tahap pembelajarannya sendiri; (4) Membolehkan peserta didik menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kemahiran ke mata pelajaran lain, situasi baru dan pergaulan.

Ketika kita memperoleh pemahaman tentang keempat manfaat tersebut, maka para pengembang pendidikan nonformal harus sudah mulai mampu menggeser paradigma berfikir tentang apa yang harus dirubah dari cara mengajar dengan cara membelajarkan materi kepada peserta didik. Ini berarti pemahaman tentang kondisi peserta didik apa adanya, pemahaman tentang kemampuan diri sebagai tutor, fasilitator dan pelatih, pemahaman tentang berbagai sumber yang dimiliki harus menjadi patokan dalam mengurai kurikulum menjadi bagian-bagian kecil materi pembelajaran yang bermuatan kompetensi. Seperti kita pahami kurikulum biasanya menjelaskan apa yang harus diajarkan serta kurikulum bermuatan kompetensi juga akan tetap menjelaskan apa yang harus diajarkan, tetapi akan memfokuskan pada penjelasan tentang apa yang harus peserta didik lakukan sebagai hasil belajarnya.

Dengan kata lain kurikulum berkompetensi akan memuat kompetensi yang perlu diajarkan, dilatihkan atau diberikan oleh tutor kepada peserta didiknya. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan tutor, fasilitator untuk terampil menggeser fokus program pembelajarannya dari tutor, fasilitator dan apa yang

mereka ajarkan ke peserta didik dan apa yang akan mereka capai sebagai hasil pembelajaran, serta bagaimana cara mencapainya (Ella Yulaelawati, 2003).

Keempat: motivasi berprestasi, ada faktor yang perlu menjadi perhatian pengembang pendidikan nonformal dari sisi warga belajar faktor tersebut adalah motivasi. Motivasi peserta didik adalah sisi psikologis yang menjadi pemicu terjadinya aktivitas partisipasi pembelajaran dalam kegiatan belajar pendidikan nonformal. Tanpa motivasi secanggih apapun model pembelajaran serta alat atau media pembelajaran yang digunakan tutor, proses pembelajaran tidak akan berlangsung hangat, partisipatif, dan mungkin hasil pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Secara teoritis motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, kebutuhan, keinginan, dan harapan. Sumadi Suryabrata (1984: 72), mendefinisikan motif sebagai “keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai sesuatu tujuan”. Dari pengertian itu nampak bahwa motif bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena adanya sesuatu yang dapat disaksikan.

Motivasi lebih menunjukkan pada pengertian proses psikologis yang terdapat pada individu dalam hal ini peserta didik, dan merupakan unsur pokok dalam melahirkan aktivitas tingkah lakunya. Sebagai sesuatu proses psikologis, motivasi hanya diamati melalui penampilan perilakunya. Petri sebagaimana dikutip Ishak Abdulhak (1988: 10) mengungkapkan:

Pada hakekatnya motivasi memiliki dua komponen utama, yaitu; gerak tingkah laku yang ditandai oleh adanya respons yang nampak terhadap sesuatu objek, atau rangsangan tertentu, adanya ketepatan tingkah laku disamping tingkah laku yang dilahirkannya memiliki kekuatan arah tingkah laku yang ditunjukkan secara khusus pada pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Ungkapan tersebut menggambarkan, bahwa motivasi sesungguhnya merupakan suatu proses psikologis dalam mana terjadi interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, proses belajar, dan pemecahan persoalan. Hal inilah antara lain yang menyebabkan M.R. Jones (ed) dalam Nebraska Symposium on Motivation, merumuskan: *"Motivation is concerned with how behavior is actived, maintained, directed and stopped"*. Sedangkan Sutaryat Trisnamansyah (1984:156) mengungkapkan lebih jauh bahwa motivasi sering disebut sebagai dinamika perilaku atau sesuatu yang menggerakkan organisme untuk mengerjakan apa yang diperbuatnya.

Motivasi diawali dengan keinginan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Keinginan tersebut melalui proses persepsi diterima oleh seseorang. Proses persepsi ini ditentukan oleh kepribadian, sikap, pengalaman, dan harapan seseorang. Selanjutnya apa yang diterima tersebut diberi arti oleh yang bersangkutan untuk mengembangkan beberapa alternatif tindakan dan pemilihan tindakan.

Berdasarkan tindakan ini selanjutnya ia melakukan evaluasi, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapainya dengan tindakannya sendiri. Perlu dikemukakan bahwa faktor intrinsik yang berkaitan dengan motivasi dan keinginan seseorang dalam proses tersebut memegang peranan penting. Seseorang mungkin atas dasar pengalaman masa lampau dan harapannya, memerlukan uang. Yang lain mungkin memerlukan kekuasaan, sementara yang lain lagi memerlukan rasa aman dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan perkataan lain, faktor intrinsik tadi menyebabkan motivasi seseorang berbeda dengan motivasi orang lain.

Berdasar kepada teori-teori tersebut, maka motivasi untuk meningkatkan kemampuan membelajarkan peserta didik, sangat dipengaruhi oleh persepsi dan faktor intrinsik yang berkaitan dengan kemampuan tutor dan fasilitator dalam memahami masalah-masalah pendidikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Tutor dan fasilitator dengan segala kompetensinya,

harus merasa terpacu untuk selalu giat dalam mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai binaannya.

b. Kondisi Sumberdaya Belajar (Tutor, Fasilitator dan Pelatih)

Salah satu sumber belajar yang paling utama dalam pendidikan nonformal adalah guru pendidikan nonformal. Namun kata guru seringkali tidak dipergunakan dalam istilah-istilah pembelajaran pendidikan nonformal, guru biasanya digunakan dalam istilah pendidikan formal atau sekolah. Dalam pendidikan nonformal seringkali guru istilahnya diganti dengan tutor, fasilitator atau pelatih. Padahal dalam kenyataannya tutor, fasilitator dan pelatih itu adalah guru.

Pada penyelenggaraan program pendidikan nonformal tutor dan fasilitator seringkali bertindak sebagai gurunya pendidikan nonformal, baik dalam program kesetaraan (paket A, paket B dan Paket C) maupun dalam kegiatan pendidikan non formal lainnya. Dalam pendidikan non formal tutor dan fasilitator, memiliki fungsi dan peran yang berbeda, akan tetapi fasilitator bisa juga bertindak sebagai tutor atau sebaliknya.

Tutor dalam pendidikan nonformal adalah orang yang profesional (memiliki kompetensi, kemampuan dan keterampilan) dalam mengelola proses pembelajaran pendidikan nonformal. Tugas-tugas yang dibebankan kepadanya adalah: (1) memahami kurikulum, (2) menyiapkan bahan pembelajaran (materi), (3) memformulasi proses pembelajaran, (4) mengelola administrasi pembelajaran, (5) mengelola proses pembelajaran, (6) memotivasi peserta didik, (7) menggali-sumber-sumber pembelajaran, (8) berpartisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, (9) dan mengevaluasi pembelajaran, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitator adalah orang yang profesional dalam memfasilitasi program pendidikan nonformal.

Tugas-tugasnya adalah: (1) menyiapkan rencana program, (2) mengelola program, (3) menyiapkan sumber-sumber pembelajaran

(manusia dan non manusia), (4) melakukan monitoring dan evaluasi program, (5) dan memelihara kelangsungan program pendidikan nonformal.dll. (Peran Fasilitator Kominkan, 2006).

Jika ditelaah dalam ma'na yang lebih mendasar peran tutor dan fasilitator tidak hanya bertindak sebagai guru, layaknya di sekolah atau dalam prose pembelajaran lainnya. Tutor dan fasilitator memiliki peran ganda dalam pendidikan nonformal. Dia tidak hanya profesional dalam mengelola program pendidikan nonformal dan profesional dalam mengelola proses pembelajaran, akan tetapi yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan peserta didik menjadi manusia-manusia yang memiliki masa depan yang jelas.

Dalam arti ketika proses pembelajaran berlangsung atau ketika materi pembelajaran disampaikan, apa makna dari proses dan materi pembelajaran tersebut bagi peserta didik, keluarga, masyarakat dan bangsanya?. Bisakah peserta didik merasakan bahwa materi tersebut mendukung terhadap nilai-nilai kehidupannya baik kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi?. Jika semua itu bisa dijawab dengan sempurna maka itulah yang disebut dengan guru pendidikan nonformal atau dikenal dengan tutor/fasilitator. Oleh karena itu pengembangan kurikulum pendidikan nonformal harus betul-betul memperhatikan dan berpartisipasi semua komponen yang berhubungan dengan kelangsungan program pendidikan nonformal, atau tidak hanya sekedar berpartisipasi peserta didik atau tokoh masyarakat saja.

Berdasar kepada pertanyaan dan pernyataan tersebut, tutor dan fasilitator pendidikan nonformal memiliki tugas yang sangat berat dan mendasar dalam pengembangan pendidikan nonformal, oleh karenanya beberapa kompetensi yang harus dimiliki adalah: (1) terampil dan profesional dalam mengelola program pendidikan nonformal, baik program secara keseluruhan maupun program pembelajaran, (2) terampil dan profesional dalam membaca sasaran pendidikan nonformal, (3) terampil dan professional

dalam menyiapkan dan menterjemahkan kurikulum dan materi-materi kurikulum, (4) terampil dan profesional dalam membaca masalah-masalah peserta didik dan masyarakat, (5) terampil dan profesional dalam melihat peluang-peluang baik peluang sosial maupun peluang ekonomi untuk pengembangan program dan memasarkan peserta didik, (6) terampil dan profesional dalam menjual program pendidikan nonformal, (7) terampil dan profesional dalam menggali sumber-sumber yang dapat meningkatkan kelangsungan program.

Mungkin banyak kompetensi lain yang berkaitan dengan tutor, fasilitator, namun demikian kompetensi-kompetensi tersebut dapat dijabarkan lebih rinci dalam pengembangan program pendidikan nonformal ke depan. Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, akan tetapi yang paling penting adalah ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan tugas dan tanggungjawab sebagai pembimbing, pelatih, pendidik, penolong, peneliti dan pengembang proses pendidikan nonformal.

c. Lingkungan Masyarakat

Pendidikan non-formal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat terutama masyarakat sasaran pendidikan non-formal. Sasaran pendidikan non-formal yang semakin luas yang tidak hanya sekedar berhubungan dengan masyarakat miskin dan bodoh (terbelakang, buta pendidikan dasar, drop out pendidikan formal), akan tetapi sasaran pendidikan non-formal terus meluas maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja dan budaya masyarakat itu sendiri.

Mengingat sasaran tersebut, maka program/kegiatan pendidikan non-formal harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya

perluasan kegiatan/program pendidikan non-formal harus sejalan dengan pemikiran baru tentang konsep belajar (learning), di mana belajar yang terkesan hanya berlangsung di sekolah (formal) kurang tepat lagi dan mulai bergeser ke luar setting persekolahan. Belajar harus dipandang sama dengan

“living, and living itself is a process of problem finding and problem solving”. We must learn from everything we do, we must exploit every experience as a learning experience. Every institution in our community government or non-government agencies, stores, recreational places, organizations, churches, mosques, fields, factories, cooperatives, associations, and the like becomes resources for learning, as does every person we access to parent, child, friend, service, provider, doctor, teacher, fellow worker, supervisor, minister, store clerk, and so on and on, Learning means making use every resources-in or out of educational institutions for our personal growth and development. Even the word is regarded as a classroom” (Knowles, 1975).

Perubahan, pengembangan dan perluasan pendidikan non-formal memberikan suatu apresiasi dan nuansa baru terhadap cara-cara pendidikan non-formal dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama orang dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan formal maupun mereka yang pendidikan formalnya terbukti tidak memadai dan tidak relevan dengan kehidupan dan situasi yang berkembang di lingkungannya (masyarakat).

Proses pembangunan menuntut partisipasi jutaan orang dewasa yang terdidik, sementara lembaga pendidikan formal yang ada tidak mampu mengakses permasalahan-permasalahan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Di daerah-daerah tertentu sejumlah penduduk menemukan bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak mampu membekali keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara terbuka dan gamblang dalam masyarakat teknologis (Srinivasan, 1977).

Proses pendidikan itu mengembang ke luar dari sistem-sistem formal terstruktur, ke dalam suatu sistem konfigurasi baru dari suatu rangkaian pemikiran dan pengalaman yang terpisah secara melebar, dan jenis pertemuan lainnya dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. Peran pendidikan non-formal sebagai komplemen, suplemen maupun substitusi pendidikan formal (persekolahan) merupakan suatu konfigurasi yang *contextual based and life-relefant*, sehingga mampu mewujudkan program/kegiatan pendidikan non-formal yang strategis dan fungsional bagi masyarakat.

Munculnya konsep masyarakat gemar belajar sepanjang hayat sebagai master concept, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam merespon tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar (*learning*). Sekolah sebagai program formal tidak lagi menjadi satu-satunya wadah (wadah tunggal) dan memonopoli pendidikan (formal) persekolahan dan badan-badan bisnis tidak lagi mengurus bisnis semata, akan tetapi sudah mulai bergeser ikut serta mengurus pendidikan khususnya pendidikan non-formal. Lahirnya organisasi-organisasi baru berpenampilan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan tanpa label sebagai tambahan, perluasan lanjutan dan lainnya memberi kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk belajar membelajarkan diri. Sehingga menjadi "*self-supporting organizations*" untuk ikut andil mengembangkan pendidikan non-formal.

Ada beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan non-formal di antaranya adalah: Masyarakat ikut membangun PKBM, sanggar-sanggar kegiatan belajar lain, magang, Kejar Usaha Produktif, Pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren memberikan bekal kepada santri tidak hanya dalam bentuk pendidikan agama akan tetapi sudah mulai bergeser pada pendidikan umum, dan keterampilan wirausaha sebagai

bekal hidup dan kehidupannya di masyarakat. Sosialisasi usaha pendidikan secara luas melalui organisasi masyarakat dalam dunia pendidikan dikenal juga dengan sebutan "*learning society*". Begitu pula bekal-bekal pendidikan dan keterampilan yang berhubungan dengan mata pencaharian lainnya. (pertanian, perikanan, industri rumah tangga).

Terciptanya masyarakat gemar belajar (*learning society*) memberikan nuansa baru dan ruh pendidikan di tengah-tengah masyarakat, kondisi ini dicermati sebagai suatu wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat. Iklim tersebut mendorong terbukanya kesempatan setiap orang, organisasi dan institusi sosial, industri dan masyarakat untuk belajar lebih luas; tumbuhnya semangat dan motivasi untuk belajar mandiri (*independent learning*) untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hayat, dan memperkuat keberdaya-didikan (*educability*) masyarakat agar selalu mendidik diri dan masyarakat di lingkungannya, adalah merupakan sisi positif dari lahirnya konsep-konsep yang mendasari pendidikan non-formal.

Terciptanya masyarakat gemar belajar dapat menciptakan berbagai peluang pendidikan non-formal di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai potensi, keterampilan dan kecakapan warga belajar. Meta konsep *educability* memungkinkan masyarakat (warga belajar) "*fully able to take advantage of any available educational opportunities*", lebih giat mencari informasi baru yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya.

Berdasar pada peran-peran pendidikan non-formal serta strategi dasar pengembangannya di tengah-tengah masyarakat, maka kajian pendidikan non-formal diarahkan pada dua hal pertama, kajian pendidikan non-formal itu sendiri (kajian internal), kajian ini berhubungan dengan: kajian kurikulum (program PNF), model-model program PNF, sasaran program PNF, keberadaan program PNF (peran dan fungsi) di tengah-tengah masyarakat dll.

Kedua kajian pendidikan non-formal berkaitan dengan pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap program-program

PNF (pengakuan), kajian ini bisa disebut sebagai kajian eksternal. Kajian ini penting karena masyarakat tidak hanya diarahkan sebagai sasaran pendidikan non-formal saja akan tetapi masyarakat dipandang sebagai pelaku (sumber belajar) pendidikan non-formal itu sendiri. Sedangkan harapan terhadap pemerintah hanya berhubungan dengan pengakuan terutama diimplementasikan pada tata kebijakan yang dibangun untuk mengkondisikan keberadaan pendidikan non-formal di tengah-tengah masyarakat.

2. Mengembangkan Kemandirian Dalam Proses Pembelajaran PNF

a. *Definition Of Independency*

Seperti diketahui dalam konsep pendidikan nasional, bahwa core value pendidikan nasional adalah *independency* (kemandirian). Kemandirian dalam hal ini berarti suatu momot karakteristik individu sehingga mampu membuat keputusan sendiri setelah secara masak dan konsekuen mampu mensistemkan dan mensinergikan lingkungannya secara baik. Secara tegas DePorter menyebutkan, bahwa :

Core value independency, tampil dalam proses pendidikannya sebagai proses empowering atau pemberdayaan. Artinya dengan berbagai pembekalan isi dan wawasan ditumbuhkan kreativitas individu dan satuan sosial, dan secara jeli dan cerdas mampu mensistemkan dan sekaligus mensinergikan lingkungannya untuk menggapai *independency*. (DePorter, 1999:43)

Ada beberapa instrumental value yang dapat mendukung core value kemandirian (*independency*) untuk menjangkau core value ideal *excellence*. Secara jelas diagramnya digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel: 5.1
 Nilai-nilai Kemandirian

Instrumental Value	Core Value Intermediate	Core Value Ideal
1	2	3
Autonomy		
Ability		
Kesadaran Demokrasi		
Kreativitas		
Kesadaran kebersamaan	Kemandirian	Excellence
Kompetitif	(independency)	(rasa unggul)
Aestetis		
Wisdom		
Bermoral		
Dignity		
Pride		

Sumber : DePorter (1999)

Instrumental value yang pertama adalah *autonomy* ; kesadaran dimilikinya otoritas pribadi atau otoritas satuan sosial. Kesadaran autonomi dan otoritas tanpa dimilikinya *ability* atau *validitas* menjadi omong kosong. Sehingga perlu ditumbuhkan instrumental value yang kedua yakni *ability*; Dalam proses pendidikan *ability* mencakup pengertianabilitas dan validitas, terampil atau ahli dan diakuiinya keterampilan dan keahlian tersebut melalui sebuah bukti nyata. *Ability* perlu dibina dalam wawasan bahwa *ability*-nya memerlukan komplementasi dan dalam interdependensi dengan *ability* orang lain. Sehingga diperlukan instrumental value yang ketiga yaitu kesadaran demokrasi.

Akibat adanya perubahan teknologi dan perkembangan industrialisasi serta persaingan tenaga kerja semakin ketat, maka

pada konteks ini perlu adanya *keativitas* sebagai instrumental value pendukung. Oleh karena itu perubahan bukan lagi mengikuti garis linier deret hitung, melainkan sudah menjadi eksponensial. Sehingga tuntutan kreativitas menjadi semakin penting, dan pendidikan yang mengandung unsur kreativitas sejak dini menjadi semakin signifikan. Kreativitas dalam makna lokal maupun global tidaklah dikembangkan untuk saling menggilas dan mematikan, tetapi dalam makna dikembangkan untuk memberi komplementasi atau komparasi alternatif. Sehingga memerlukan instrumental value yang kelima yakni; kesadaran kebersamaan kompetitif. Kompetisi rasional akan tampil berupa kompetisi untuk keunggulan dengan cara sportif, dapat diperkaya dengan kompetisi religius human menjadi kompetisi untuk menampilkan keunggulan dalam membuat kebajikan.

Kreativitas yang sifat dasarnya rasional, dan kompetisi rasional serta kompetisi religious human akan menjadi lebih lengkap bila dikomplementasi dengan dua instrumental value yang keenam dan ketujuh, yaitu nilai *aestetic* dan *wisdom* (bijak). Makna *aestetic* mencakup makna original, harmonis dan mensucikan dalam penghayatan fungsi hati, fungsi sosial, dan fungsi teknik. Instrumental value *aestetic* disamping mampu menampilkan moral mensucikan, memiliki makna bahwa dengan menghayati produk seni yang indah, yang muncul adalah hati yang bersih, bukan emosi dan persepsi lain. Makna bijak mencakup makna saling memahami kesamaan dan keberbedaan dan saling menghargai dan menghormatinya. Instrumental value lainnya adalah bermoral. Instrumental value yang akan tumbuh lebih lanjut setelah instrumental value-instrumental value terpatir dalam diri individu adalah *dignity* (harkat), *pride* (martabat) dan *excellence* (rasa unggul).

Nilai-nilai kemandirian yang dimiliki individu akan menjadi sempurna apabila didukung oleh sifat-sifat kemandirian meliputi : mandiri psikososial, kultural dan ekonomi, disiplin prakarsa dan wirausaha, kepemimpinan dan orientasi prestasi dalam persaingan.

Pada konteks dunia kerja mandiri atau kemandirian muncul seiring dengan berkembangnya orientasi kerja, yang mengarah pada sikap wirausaha/wiraswasta. Perilaku mandiri merupakan fundamen dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja (pekerjaannya). Suharsono Sagir (1986:15) menyatakan:

Mandiri, menciptakan kerja untuk diri sendiri, maupun berkembang menjadi wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain ataupun mampu menjadi cendekiawan, manusia yang berkreasi, inovatif, melalui ide-idenya atau hasil penemuannya, menjadikan masyarakat lebih baik; baik dalam bentuk inovasi teknologi, ataupun inovasi ilmu yang mampu mengembangkan ilmu lebih maju, sebagai upaya *preventiv* maupun repressif untuk kelangsungan hidup sumberdaya manusia.

Jiwa mandiri tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya konsep wiraswasta, atau dikenal istilah lain yakni wirausaha dan kewirausahaan, juga istilah lain yang disebut dengan makarya. Seorang wiraswastawan harus memiliki jiwa mandiri atau kemandirian. Wasty Soemanto menyebutkan dalam tulisannya bahwa, Wiraswasta adalah keberanian, keutamaan serta kepercayaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan ketekunan yang ada dalam diri sendiri. Jiwa entrepreneurship (mandiri) ditentukan oleh tiga komponen utama yang ada dalam diri seseorang yakni kemauan, ketekunan dan keuletan. (Wasty Soemanto, 1976:42-43). Geoffrey G. Meredith (1989), memberikan beberapa ciri sifat-sifat wirausaha (jiwa mandiri) seperti pada bagan di bawah ini:

Tabel: 5.2
Sifat-Sifat Wirausaha

No	Ciri-ciri	Watak
1.	Percaya Diri	Keyakinan Ketidak tergantungan Individualitas Optimisme
2.	Berorientasikan tugas dan hasil	Kebutuhan akan prestasi Berorientasi laba Ketekunan dan ketabahan Tekad kerja keras Mempunyai dorongan kuat Energik dan inisiatif
3.	Pengambilan Resiko	Kemampuan mengambil resiko Suka pada tantangan
4.	Kepemimpinan	Bertingkah laku sebagai pemimpin Dapat bergaul dengan orang lain Menggapai saran dan kritik
5.	Keorisinilan	Inovatif dan kreatif Fleksibel punya banyak sumber Serba bisa Mengetahui banyak
6.	Berorientasi ke masa depan	Pandangan ke depan dan Perseptif

Geofrey G. Meredith, at al. (1989) (Ranidar Darwis, 1993 :40)

Kemandirian sebagai kepribadian atau sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap orang yang di dalamnya terkandung unsur-unsur dengan watak-watak yang ada di dalamnya perlu dikembangkan agar tumbuh menyatu dalam setiap gerak kehidupan manusia. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian dapat menentukan sikap dan perilaku seseorang menuju ke arah wiraswastawan.

Para ahli menyebutkan bahwa kemandirian adalah merupakan jiwa wiraswasta yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pemahaman dan konsep hidup, yang mengarah pada kemampuan,

kemauan, keuletan, ketekunan dalam menekuni bidang yang digeluti. Sehingga seorang wiraswastawan yang berhasil berarti memiliki jiwa mandiri (makarya).

Pada dunia ekonomi jiwa mandiri (kemandirian) sudah dikenal sejak tahun 1755 oleh Cantillon dimana dikenal dengan istilah entrepreneur, dan dikembangkan lagi setengah abad kemudian oleh Schumpeter tahun 1911 dan oleh Sombart tahun 1929, dan pada pertengahan abad itulah entrepreneur menjadi cikal bakal bagi perkembangannya di dunia ekonomi modern. (Daoed Yusuf, 1976: 88).

Pada dunia Pembangunan masyarakat kemandirian sudah dikenal sejak PBB memberikan batasan tentang pengertian dari Pembangunan masyarakat (Community Development). Pada definisi tersebut disebutkan bahwa:

...the participation of the people themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative, and the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual help and make these more effective. (UN. 1956).

Mengacu pada batasan tersebut kemandirian, memiliki nilai lain yang tidak hanya sekedar menjiwai konsep wiraswasta yang lebih mengarah pada nilai-nilai ekonomi (benefit), namun pada definisi tersebut terkandung pula nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya dengan kandungan utamanya selain mampu menolong dirinya sendiri akan tetapi mampu menolong orang lain dalam bentuk gotong royong dan partisipasi. Sehubungan dengan itu konsep kemandirian yang menjiwai nilai-nilai wiraswasta sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Karena secara lebih luas kemandirian tidak hanya untuk itu akan tetapi berlaku bagi setiap gerak langkah kehidupan manusia.

Pada konteks pendidikan luar sekolah, kemandirian merupakan tolak ukur utama dalam setiap pengembangan program-programnya. Oleh karena itu kurikulum program pembelajaran pendidikan

nonformal, secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap sasaran didiknya (warga belajar). Tanpa tujuan itu setiap program pembelajaran pendidikan nonformal menjadi tidak bermakna dan sama saja dengan program pembelajaran pendidikan sekolah. Asumsi ini merupakan batasan khusus yang mampu membedakan mana program pendidikan nonformal dan mana program pendidikan sekolah.

Seperti diketahui pengembangan program pendidikan non-formal yang mengacu pada kemandirian sasaran didik, merupakan tekanan khusus yang seringkali menjadi patokan dan prinsip dasarnya. Oleh karena itu program pendidikan nonformal nampak lebih fleksibel. hal ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang pada sasarnya.

Mengacu pada hal tersebut, maka pendidikan non formal lebih banyak menekankan pada pengembangan ranah afektif dan psikomotor: seperti motivasi, sikap modern, keterampilan bertani, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Disamping itu pula program pendidikan nonformal selain fleksibel cenderung berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan peserta didiknya. Dengan berbagai keterampilan dan sikap yang dibina dalam pendidikan nonformal, maka sasaran didik (warga belajar) diharapkan mempunyai sejumlah kemampuan yang kemudian hari dapat dijadikan modal untuk mengembangkan usahanya secara mandiri dan memperoleh keuntungan yang lebih baik; keuntungan dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Prinsip tersebut memiliki asumsi bahwa, pendidikan luar sekolah dalam pengembangan programnya selalu menilai potensi dan otonomi yang dimiliki sasaran didik. Sehingga hal itu menjadi landasan utama bagi setiap perencanaan dan pengembangan program pendidikan nonformal. Secara filosofis pandangan

tersebut sejalan dengan konsep *humanistik*. alasan utamanya karena humanistik merupakan salah satu aliran filsafat yang memandang, bahwa manusia memiliki potensi dan otonomi dalam kehidupannya. Hal lain yang dapat dijadikan alasan, karena dalam pengembangan programnya PLS selalu menganggap dan memiliki komitmen bahwa sasaran didik sebagai: (a) *Human nature is naturally good*, (b) *freedom and autonomy*, (c) *individually and potensiality*, (d) *Self concest and the self*, (e) *self actualization*, (f) *perception*, (g) *responsibility and humanity*. John L Elias, S. Merriam, (1980: 117-121).

Sejalan dengan konteks ketenaga kerjaan tujuan pendidikan nonformal semakin jelas dan terfokus, C.S. Brembeck dan T.J. Thomson (1973: 5-6), menjelaskan bahwa: Tujuan pendidikan nonformal makin jelas, dilihat dari klasifikasi kegiatannya; Mau mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kerja yang sudah sedang bekerja, (1) Menyiapkan mereka, terutama generasi muda yang akan memasuki lapangan kerja, dan (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pemahaman warga belajar tentang perubahan kemajuan dalam dunia kerja.

Dari tujuan dan kajian filosofis humanistik tersebut memberikan kejelasan bahwa tujuan pendidikan nonformal adalah mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan dan potensi sasaran didik pendidikan nonformal, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan dan menolong dirinya sendiri, disamping itu pula dapat membangun lingkungannya, masyarakatnya, dan lebih luas lagi dapat berperan secara aktif dalam membangun bangsa dan negara. (Scott W. Morris 1979) secara tegas memberikan kesimpulan bahwa tujuan pendidikan nonformal (non-formal education) adalah *to help people help them selves*. Djudju Sudjana, (1992:160), menyebutkan, bahwa tugas pokok pendidikan nonformal ; membelajarkan warga belajar. Dengan tujuan agar warga belajar memiliki atau mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memenuhi

kebutuhan individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam hal peningkatan kemandirian warga belajar, pendidikan nonformal dengan prinsip dasar, dimana konsep belajar harus menjadi suatu kegemaran, menjadi kebutuhan sehingga tercipta “*self active learning propelling*” (belajar aktif dengan sendirinya). Pada konteks itu keinginan dan kebutuhan belajar muncul dari dalam diri sendiri (*internal motivation*) dan bukan didorong atau dianjurkan orang lain (*external motivation*). Sehingga sikap tersebut muncul apabila warga belajar merasa bahwa dengan pembelajaran, merasa mendapat pengetahuan, nilai tambah bagi pengembangan diri, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dirinya dan orang lain. Disamping itu pula dengan pembelajaran warga belajar (individu) merasakan adanya peningkatan kemampuan dalam berpikir, memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, keterampilan, kualitas hidup dan kehidupannya serta kariernya. Belajar dirasakan memberi makna yang jelas dan dalam bagi hidup dan kehidupannya, memudahkan untuk melakukan suatu karya, memudahkan bagi kehidupannya. Sehingga belajar dapat menyebabkan adanya proses *transformasi* kearah kemandirian.

b. Peran Pendidikan Nonformal dalam Menumbuhkan Kemandirian Peserta Didik

Kemandirian dalam pendidikan luar sekolah berarti juga *self directed learning*. Karena beberapa pengertian dasar dari *self directed learning* memberi acuan bagaimana warga belajar memiliki inisiatif untuk belajar, menganalisis kebutuhan belajar sendiri, mencari sumber belajar sendiri, memformulasi tujuan belajar sendiri, memilih dan mengimplementasikan strategi belajar dan melakukan *self evaluatin*. Komponen-komponen tersebut merupakan dimensi bagaimana PNF membangun karakter kemandirian dalam diri peserta didik. (*autonomous learning*).

Knowles (1975:18) menguraikan secara jelas tentang pengertian *self directed learning*:

"as a process in which individuals take the initiative, with or without the help of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and other resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes".

Chene (1983) dalam Peter Jarvis (1992:120), memberikan pengertian bahwa, kemandirian dalam belajar (autonomy) berarti *"self directed learning"*, sehingga secara jelas menyebutkan: *...autonomous learning involves three elements; independence in the learner, the learner's creation of norms, and the learner's ability of forces and choose*.

Sedangkan Lindley (1986), menyimpulkan dari beberapa ahli seperti Kant, Hume, dan Mill, bahwa : Kant memberikan batasan yang pasti bahwa autonomy merupakan ide-ide rational yang menyatu dengan *emotion, affection, dan morality*, sedangkan Hume memberikan argumen bahwa *"a combination of rationality and affect underlies autonomous acts"*. Sedangkan Mill memberikan argumen bahwa *autonomy is a vital aspect of human life but must be combined with respect for persons*. Peter Jarvis (1992:125).

Maslow dalam Darkenwald dan Merriam, (1982:80) memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor pendidikan orang dewasa yang dapat menumbuhkan kemandirian dalam kerangka pengembangan self-actualization. diantaranya adalah : *"...they are autonomous, independent, and able to remain true to themselves in the face of rejection or unpopularity"*. Pada konteks lain Maslow memberikan arahan bahwa implikasi dari filsafat pendidikan humanis adalah bagaimana membangun warga belajar (peserta didik) mampu mandiri dan mau belajar nyata dari lingkungannya. Sehingga tujuan pendidikannya adalah self actualization atau *"helping the person to become the best that he is able to become"*.

Davis (1983:35) memberikan tiga kekuatan dasar bagi pengukuran profesional yang didasari kemandirian yakni: pengetahuan, keterampilan dan bersikap mandiri. Elemen-elemen tersebut

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel: 5. 3
Elemen Kemandirian

Mengetahui dan memahami tentang	Terampil dalam	Bersikap mandiri dan profesional dalam
<ul style="list-style-type: none"> • Disiplin akademik • Dasar-dasar keterampilan • Hubungan antar pribadi • Nilai-nilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan prosedur-prosedur keterampilan • Bergaul dengan orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami sifat kemandirian • Berkomitmen terhadap kemandirian • Berkemauan untuk melakukan sesuatu secara mandiri

Sumber: Davis (1983:35)

C. Faktor-Faktor Meningkatkan Kemandirian Warga Belajar dalam PNF

Mengacu pada asumsi-asumsi Davis (1983:35), maka faktor yang terkandung dalam konsep pembelajaran pendidikan nonformal serta dianggap dapat meningkatkan kemandirian warga belajar adalah:

1. Kegiatan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik

Program pendidikan nonformal dalam konsep pengembangan program pembelajarannya seringkali dilakukan dan disusun bersama-sama antara sumber belajar dan warga belajar, ini berlaku sampai tahap evaluasi, disamping itu pula dalam konsep pembelajaran pendidikan nonformal warga belajar diberikan kewenangan

6

Manajemen Pengembangan SDM Pendidikan Non Formal

A. Perlunya Manajemen SDM Pendidikan Non Formal

Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi menuntut organisasi untuk membuka diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun strategi dan kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan bisnis maupun lingkungan masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan perkembangan organisasi. Perubahan yang terjadi sangat bergantung kepada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Artinya suatu organisasi mampu menyusun strategi dan kebijakan yang ampuh untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Keberhasilan penyusunan kebijakan dan strategi organisasi akan didukung lebih banyak fungsi manajerial yang ada (Datton, and Jackson, 1987).

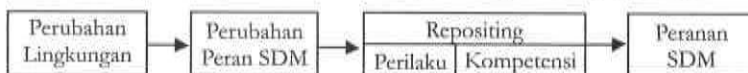
Salah satu bidang fungsional strategi yang menjadi perhatian adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi, oleh karenanya manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya (Ulrich, 1991). Adalah suatu kewajiban apabila penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia relevan dengan penyusunan strategi bisnis (Schuller and Jackson, 1992).

Hal ini apabila dikaitkan dengan misi PNF untuk memberdayakan manusia adalah arti yang lebih spesifik “dari, oleh, dan untuk masyarakat”, maka yang menjadi fokus pengembangan manajemen PNF ini salahsatunya adalah mengedepankan manajemen pengembangan SDM, tidak berarti yang lainnya dikesampingkan.

Untuk dapat menyusun strategi sumber daya manusia yang baik ternyata dibutuhkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi. Hal ini penting mengingat adanya peran baru sumber daya manusia sangat mendukung kompetensi yang dituntut oleh sebuah organisasi sehingga organisasi tersebut survive terhadap perubahan (Bowen,et al, 1992). Berikut ini digambarkan bagaimana peran strategis pengembangan sumber daya manusia dan perubahan-perubahan yang melingkupinya.

Gambar 6.1

Kerangka berpikir Peran Strategis Pengembangan SDM



Sumber: Ignatius Roni Setyawan, (2002)

Kerangka berpikir seperti disajikan pada gambar tersebut, memberikan gambaran tentang beberapa hal yang berkaitan dengan upaya *repositioning* peran sumber daya manusia untuk mencapai peran sumber daya manusia strategis.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Strategi Pengembangannya

1. Strategi-strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kajian dimulai dari adanya penekanan pada perubahan lingkungan bisnis dramatis yang memiliki pengaruh terhadap perubahan peran sumber daya manusia. Untuk mendukung perubahan tersebut organisasi perlu melakukan *repositioning* baik dalam hal perilaku dan kompetensi sumber daya manusia sebagai

bagian dari repositioning peran sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Setelah proses repositioning perilaku dan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan maka organisasi diharapkan dapat mencapai peran sumber daya manusia strategis.

Barangkali perhatian utama spesialis sumber daya manusia adalah kontribusi yang dapat disodorkan oleh fungsi manajemen sumber daya manusia untuk membantu organisasi memenuhi misi, tujuan, dan strateginya. Misi organisasi (organizational mission) biasanya merupakan pernyataan manajemen puncak, atau gambaran dari keseluruhan maksud (purpose) organisasi. Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan standar produksi, pasar dan finansial apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, suatu tujuan dari perusahaan otomotif mungkin untuk menguasai 12 persen pangsa pasar mobil sedan.

Tujuan dapat pula dinyatakan dalam terminologi finansial seperti profitabilitas atau persentase kembalian investasi. Manajer sumber daya manusia menentukan tujuan spesifik yang berkenaan dengan tingkat staffing, tindakan persetujuan, biaya tunjangan karyawan, dan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Strategi organisasi adalah alat dengan mana tujuan-tujuan akan dicapai. Keputusan strategik meliputi bauran produk, target pelanggan, metode produksi, pengeluaran modal, dan sekumpulan keputusan lain yang semuanya menggambarkan bagaimana organisasi ingin mencapai tujuannya.

Strategi bisnis telah mengkategorikan organisasi dalam banyak cara yang berbeda. Kategori ini secara khusus membedakan antara organisasi yang sedang berkembang dengan yang stabil, ataupun menurun. Riebtasi strategik organisasi dapat dikategorikan dalam hubungannya dengan orientasi laba, ukuran dan lingkup lini produk mereka, apakah mereka pemimpin, atau pengikut pasar, kecepatan yang mesti mereka gunakan untuk berubah agar bertahan hidup,

tipe struktur organisasional, kerentanan risiko atau keengganan pengambilan keputusan kunci, dan faktor-faktor lainnya.

Bilamana postur strategik sebuah organisasi telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan strategi sumber daya manusia yang akan memungkinkan organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan sasarannya. Strategi- strategi sumber daya manusia yang dapat didiskusikan di dalam makalah ini adalah:

a. Strategi Rekrutmen dan Seleksi.

Strategi ini meliputi sumber rekrutmen internal versus eksternal, rintangan berturut-turut versus prosedur seleksi kompensatori, dan seleksi formal versus informal. Strategi rekrutmen dan seleksi terinci yang dipilih oleh suatu organisasi akan tergantung pada faktor-faktor seperti tipe karyawan yang dibutuhkan, jumlah dana yang tersedia untuk rekrutmen dan seleksi, apakah tujuan organisasi termasuk memperkuat produk dan jasanya, kondisi pasar tenaga kerja, dan kewajiban tindakan persetujuan (affirmative action).

b. Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia

Kegiatan meliputi perencanaan formal dan informal, perencanaan jangka pendek versus perencanaan jangka panjang, perencanaan terpusat versus terdesentralisasi, dan perencanaan integratif versus perencanaan terpisah-pisah. Beberapa organisasi menggunakan model yang sangat canggih dan mencoba untuk memproyeksikan kebutuhan sumber daya manusia secara akurat untuk beberapa tahun kedepan. Organisasi lainnya menemukan bahwa perencanaan sumber daya manusia ekstensif hanya sedikit membantu karena ketidakpastian yang berhubungan dengan permintaan produk mereka, bentuk persaingan dalam bisnis mereka, dan perkembangan ekonomi internasional.

c. Strategi Pelatihan dan Pengembangan

Kegiatan dari strategi ini adalah; pelatihan keahlian versus pelatihan yang bersifat pengembangan (developmental),

pelatihan individu versus pelatihan on-the-job versus pelatihan off-the-job, dan jalur karier sempit versus jalur karier luas. Pemilihan strategi pelatihan dan pengembangan spesifik dapat meliputi faktor-faktor seperti kaliber dan level keahlian dari karyawan yang baru saja diangkat, tingkat terhadap mana produk dan jasa organisasi berubah, filosofi manajemen puncak terhadap pengembangan karier karyawan, dan biaya yang dihubungkan dengan pelatihan dan pengembangan.

d. Strategi Penilaian Kinerja

Strategi ini meliputi penilaian formal versus informal, penilaian umum versus spesifik-pekerjaan, berorientasi-balas jasa versus penilaian berorientasi pengembangan, bauran kriteria karakter, perilaku, dan kinerja produktifitas, penilaian yang sering versus yang jarang-jarang, serta penilaian global versus penilaian kejadian kritis. Strategi penilaian kinerja kerap kali tergantung pada tingkat terhadap mana organisasi telah mengalami permasalahan kinerja karyawan, dan tingkat dimana kreditor seleksi yang teliti telah dikembangkan yang tentunya membutuhkan validasi yang cermat. Lagipula, sistem penilaian kinerja yang ekstensif. Kemungkinan lebih telah digunakan pada saat sebuah organisasi mengaitkan merit dengan keputusan kompensasi.

e. Strategi Kompensasi

Strategi ini termasuk penekanan yang diletakkan pada keadilan internal versus keadilan eksternal, gaji awal yang rendah versus yang tinggi, strategi pengikut pasar versus pemimpin pasar (keadilan eksternal), peningkatan gaji merit yang tinggi versus yang rendah, pengaruh senioritas yang tinggi terhadap perubahan gaji versus yang rendah, gaji standar versus yang fleksibel insentif yang beraneka atau yang sedikit, insentif individu versus kelompok, dan tunjangan karyawan komprehensif versus yang terbatas. Strategi kompensasi seringkali tergantung pada apakah suatu

perusahaan berkembang, tetap stabil, ataukah menurun. Sebagai contoh, perusahaan yang berkembang mungkin menekankan gaji insentif untuk menurun level produktivitas individu yang tinggi. Organisasi yang ingin menekankan kompetensi individual dan kreatifitas dapat menggunakan rencana gaji yang didasarkan atas pengetahuan atau keahlian.

f. Strategi Manajemen Karyawan

Strategi ini, meliputi postur kerja sama versus yang bermusuhan terhadap serikat pekerja, postur kreatif versus proaktif terhadap serikat pekerja, keselamatan kerja yang tinggi versus yang rendah, kebijakan disiplin formal versus yang informal, orientasi terhadap karyawan yang acuh tak acuh versus yang paternalistik. Sebuah perusahaan dengan biaya tenaga kerja yang tinggi dapat menggunakan strategi penyerangan terhadap serikat pekerja. Beberapa perusahaan yang berserikat pekerja dengan biaya tenaga kerja yang rendah dapat memilih untuk bekerja sama dengan serikat pekerja, lebih memilih melakukan perundingan daripada menanggung risiko suatu pemogokan yang mahal. Perusahaan dengan proses produksi dan operasi yang sangat teknis yang membutuhkan keamanan pabrik yang tinggi dan perhatian terhadap keselamatan kerja dapat menggunakan postur yang ketat terhadap ukuran disipliner karyawan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manajer yang secara teratur melakukan proses pengembangan strategi sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa *distinctive capability* dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan. Beberapa hal yang dapat mendukung kegiatan itu adalah: (a) Kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan; (b) Dapat memacu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientasi dan

mendidik partisipan serta menyajikan perluasan perpektif; (c) Menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya program-program spesifik dan aktivitas; (d) Mengembangkan *sense or urgency* dan komitmen untuk bertindak; (e) Fokus strategik pada tindakan yang memiliki prioritas jangka panjang dalam mengelola fungsi sumber daya manusia dan mengembangkan bakat staf Sumber Daya Manusia.

Pengembangan sumber daya manusia melingkupi dua hal pokok, apabila seorang manajer mampu menganalisis ke lima hal pokok kegiatan yang perlu dilakukan tersebut. Pengembangan pertama meliputi pengembangan karir (penugasan) yang merupakan berkaitan dengan penyusunan jalur karir (*career path*) yang merupakan urutan-urutan posisi (jabatan) yang mungkin diduduki oleh seorang pegawai mulai dari tingkat terendah sampai pada tingkat yang paling tinggi (tingkat teratas) dalam struktur organisasi.

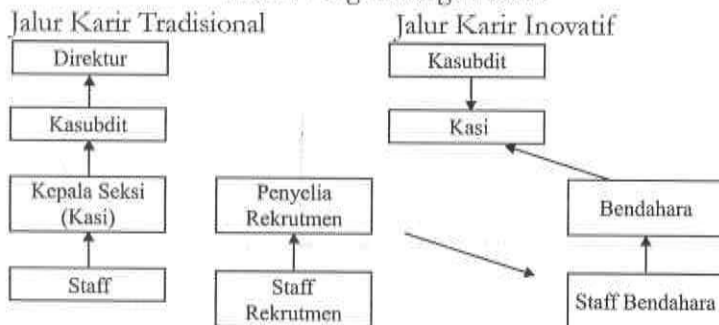
Untuk mempermudah penyusunannya, manajemen sumber daya manusia dapat menggunakan dua macam jalur karir. Pertama, jalur karir tradisional di mana urutan-urutannya merupakan kombinasi dari vertikal ke atas (promosi atau kenaikan jabatan ke tingkat yang lebih tinggi) dan horisontal (transfer atau perpindahan ke jabatan yang memiliki tingkatan yang sama). Kedua, jalur karir inovatif karena urutan-urutannya dilakukan melalui jalur kombinasi pergerakan vertikal ke atas, vertikal ke bawah (demosi atau penurunan jabatan ke tingkat yang paling bawah) dan horisontal.

Pengembangan kedua bisa dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja Pengembangan kemampuan kerja dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan (DIKLAT). Pendidikan dan latihan dilakukan berdasar kepada kebutuhan, dimana kebutuhan diperoleh dari identifikasi terhadap perbedaan kesenjangan antara kemampuan kerja yang dimiliki sumber daya manusia saat ini dan kemampuan kerja yang diharapkan. Dari

kesenjangan tersebut dapat dirumuskan kemampuan kerja apa saja yang diperlu ditingkatkan, dan pada titik inilah yang disebut dengan kebutuhan sekaligus tujuan program pendidikan dan latihan.

Pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan kerja bisa dilakukan dalam berbagai hal di antaranya adalah melalui: (1) *on the job training*, (OJT). Kegiatan diklat ini dilakukan melalui magang atau di mana sumber daya manusia peserta diklat memperhatikan rekan sejawat mereka menyelesaikan suatu pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggungjawab mereka dan kemudian diberi kesempatan untuk melakukannya sendiri di bawah bimbingan rekan sejawat tadi. (2) OST (*on-site-training*), diklat ini merupakan alternatif bagi OnJT karena OST dilakukan setelah jam kerja dengan tetap mempertahankan situasi kerja yang sesungguhnya. (3) OfJT (*off the job training*). Diklat ini merupakan alternatif khusus apabila OnJT dan OST tidak dapat dilakukan atau mungkin tidak diperlukan. Metoda OfJT pada umumnya diterapkan melalui simulasi seperti contoh program diklat penerbang, pengajar, studi kasus, bermain peran dll. Kelemahan dari model OfJT terletak pada alih pengetahuan dan keterampilan karena model ini tidak maksimal dari instruktur, karena proses pengalihannya (pembelajarannya) bersifat rekatif teoritik.

Model Pengembangan Karir



7

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wadah Pembelajaran Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat

A. Perlunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan percepatan perubahan di segala bidang, yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Menyikapi perubahan perkembangan dunia yang semakin menglobal, UNESCO menerapkan empat pilar belajar, yaitu *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Live Together*, *learning to Be*. Pada *learning to know* terkandung makna bagaimana belajar, *learning to do* mengandung dimensi kecakapan hidup manusia, *learning to live together* mengandung dimensi kehidupan multikultural, dan *learning to be* mengandung makna belajar untuk mengenal jati diri, kemampuan dan kelemahan serta kompetensi yang dikuasai untuk membangun kehidupan yang utuh secara terus-menerus.

Akibat dari penerapan empat pilar belajar tersebut, melahirkan konsep revolusi belajar, untuk melakukan perubahan model pembelajaran dari cara-cara pembelajaran tradisional kearah model pembelajaran modern, yang menghendaki peserta didik untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam belajar. Model pembelajaran modern, yaitu melatih para peserta didik untuk menjadi sumber belajar, mengubah model belajar pasif (*passive learning*) menjadi belajar aktif (*active learning*), mengubah model berpikir fakta (*factual thinking*) menjadi berpikir kritik (*critical thinking*), dari kurang aktif memberi respons menjadi proaktif memberi respons, dari berpikir abstrak menjadi autentik.

Perubahan ini, menempatkan peranan Pendidikan Nonformal dan Informal dalam posisi yang strategis.

Pendidikan Nonformal dan Informal, tidak hanya berperan dalam menangani masalah buta aksara secara teks, tetapi juga berperan secara konteks dalam membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian masyarakat, sehingga terarah pada pendidikan yang berkarakter dan dapat berkompetisi merebut peluang kerja. Untuk menuju pada pencapaian harapan tersebut, warga masyarakat dituntut agar terus belajar sepanjang hayat. Sebagai konsekuensi dari tuntutan perubahan paradigma belajar, pengelola Pendidikan Nonformal dan Informal, senantiasa mengembangkan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan Pendidikan Nonformal dan Informal yang multidimensi, mampu berperan dalam memberi solusi yang tepat, melalui proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

Seiring dengan tuntutan perubahan paradigma pendidikan dalam menghadapi tantangan abad ke-21, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang mengemban amanat pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat, memiliki komitmen kuat untuk proaktif menyikapi tuntutan kebutuhan riil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengembangkan dan memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

PKBM sebagai salah satu satuan Pendidikan Nonformal dan Informal serta wadah pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat, perlu dibenahi dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai arah perubahan. Salah satu tuntutan perubahan yang memerlukan

respons secara cepat sesuai dinamika perkembangan pengetahuan masyarakat adalah menata manajemen PKBM agar dapat berdaya melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel dan netral. Fleksibel dalam arti memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai yang mereka butuhkan, sedangkan netral adalah memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, agama, budaya dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan di PKBM. Untuk mengakomodir berbagai keragaman yang ada serta meningkatkan kualitas proses layanan pendidikan pada masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan di bawah bimbingan penyelenggara PKBM, harus merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, efisien, dan bermutu. Hal ini perlu dilakukan oleh penyelenggara PKBM, karena tuntutan perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat.

Untuk memberi arah yang jelas pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan PKBM serta merespon keinginan masyarakat untuk membentuk dan mendirikan PKBM, diperlukan adanya pedoman pembentukan dan penyelenggaraan PKBM. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin membentuk dan mendirikan PKBM, serta menjadi acuan bagi para penyelenggara PKBM dan penyelenggara program pendidikan nonformal dan informal atau pihak-pihak lain yang terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program PKBM sesuai standar yang ditentukan.

B. Makna Hakiki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

1. Sejarah dan Pengertian PKBM

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan tindak lanjut dari gagasan *Community Learning Center* telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada

tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Sudjana, 2003: 2).

Manfaat kehadirannya telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Dengan motto PKBM yaitu *dari, oleh, dan untuk* masyarakat maka masyarakat tidak lagi hanya mengikuti program-program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah melainkan juga mereka dapat merencanakan, membiayai, melaksanakan, dan menilai hasil, dan dampak program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan potensi-potensi yang terdapat di lingkungannya, sehingga masyarakatpun bertanggung jawab terhadap kegiatan PKBM tersebut.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (BPKB Jatim, 2000, 6).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya pemikiran bahwa dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai basis pendidikan bagi masyarakat perlu dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, dan beraneka ragam serta terbuka bagi semua kelompok usia dan anggota masyarakat sesuai dengan

peranan, hasrat, kepentingan, dan kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu, jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga beragam sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran masyarakat.

Secara Akronim PKBM berarti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pemaknaan nama inipun dapat menjelaskan filosofi PKBM. Hal ini sebagaimana Kemendikbud (2011: 6-9), dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut: Pertama; Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai kegiatan dan keberlanjutan keberadaan PKBM itu sendiri.

Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh seluruh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak baik yang berada di wilayah keberadaan PKBM tersebut maupun dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut misalnya pemerintah, lembaga-lembaga nasional maupun internasional, dan sebagainya. Adanya pelembagaan berbagai kegiatan pembelajaran ini juga merupakan salah satu kelebihan dari keberadaan PKBM dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada umumnya, dalam setiap kelompok masyarakat hampir selalu ada berbagai upaya pembelajaran yang bersifat non formal. Namun seringkali berbagai kegiatan dan program tersebut tidak terkelola dan terlembagakan dengan baik dan tidak terpadu sehingga keberlanjutan dan mutu kegiatannya sulit dipertahankan dan ditingkatkan;

Kedua; Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Ini juga berarti bahwa PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti dari keberadaan PKBM. Kegiatan-kegiatan ini

tentunya juga sangat tergantung pada konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat;

Ketiga; Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM haruslah merupakan kegiatan yang mampu memberikan terciptanya suatu proses transformasi dan peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif. Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang hayatnya di setiap kesempatan. Belajar tidak hanya monopoli kaum muda, tetapi juga mulai dari bayi sampai pada orang-orang tua.

Belajar juga dapat dilakukan dalam berbagai dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan dalam kehidupan berkesenian, beragama, berolahraga, adat istiadat dan budaya, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dimensi belajar seluas dimensi kehidupan itu sendiri. Dengan demikian PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat yang mengelola dan mengimplementasikan konsep belajar sepanjang hayat atau *Life Long Learning* dan *Life Long Education* serta pendidikan untuk semua atau *Education For All*.

Penggunaan kata 'belajar' dalam PKBM dan bukan kata 'pendidikan' juga memiliki makna tersendiri. Belajar lebih menekankan pada inisiatif dan kemauan yang kuat serta kedewasaan seseorang untuk dengan sadar menghendaki untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Belajar lebih menekankan upaya-upaya warga belajar itu sendiri sedangkan peran sumber belajar atau pengajar lebih sebagai fasilitator sehingga lebih bersifat *bottom up* dan lebih berkesan non formal. Sedangkan pendidikan sebaliknya lebih bersifat *top-down*, dan lebih berkesan formal, inisiatif lebih banyak datang dari sumber belajar atau pengajar.

Keempat; Masyarakat, berarti bahwa PKBM adalah upaya bersama suatu masyarakat untuk memajukan dirinya sendiri secara bersama-sama sesuai dengan ukuran-ukuran idealisasi masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan. Dengan demikian ciri-ciri

suatu masyarakat akan sangat kental mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan-tujuannya, pilihan dan disain program dan kegiatan yang diselenggarakan, serta budaya yang dikembangkan dan dijiwai dalam kepemimpinan dan pengelolaan kelembagaannya. Hal ini juga berarti bahwa dalam suatu masyarakat yang heterogen PKBM akan lebih mencerminkan multikulturalisme sedangkan dalam masyarakat yang relatif lebih homogen maka PKBM juga akan lebih mencerminkan budaya khas masyarakat tersebut.

PKBM bukanlah suatu institusi yang dikelola secara personal, individual dan elitis. Dengan pemahaman ini tentunya akan lebih baik apabila PKBM tidak merupakan institusi yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok elitis tertentu dalam suatu masyarakat. Tetapi keberadaan penyelenggara maupun pengelola PKBM tentunya mencerminkan peran serta seluruh anggota masyarakat tersebut. Dalam situasi transisi ataupun situasi khusus tertentu peran perorangan atau tokoh-tokoh tertentu atau sekelompok anggota masyarakat tertentu dapat saja sangat dominan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, prakteknya tidaklah menjadi kaku, dapat saja lebih fleksibel.

Pemaknaan kata 'masyarakat' juga untuk membedakan secara dikotomis dengan pemerintah. Artinya seyogyanya PKBM itu milik masyarakat bukan milik pemerintah. Kontribusi pemerintah adalah dalam mendukung dan memfasilitasi keberlangsungan dan pengembangan PKBM dapat saja jauh lebih besar porsiya dibandingkan kontribusi masyarakat dalam nilai kuantitas tetapi semuanya itu haruslah diposisikan dalam kerangka dukungan bukan mengambil-alih tanggungjawab masyarakat. Hal ini bukanlah mengarah pada seberapa besar proporsi kuantitas, tetapi lebih kepada semangat, kualitas dan komitmen.

Tentu saja hal ini harus didasarkan pada konteks dan potensi masing masing masyarakat. Ini juga tidak berarti bahwa mustahil adanya pegawai negeri sipil bekerja dalam suatu PKBM baik

sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, ataupun ini tidak berarti mustahil adanya alokasi anggaran pemerintah untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana PKBM serta dana operasional PKBM. Bahkan sebaliknya, tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan dan pembinaan PKBM haruslah tercermin dalam alokasi-alokasi anggaran pemerintah yang signifikan dalam memperkuat penyelenggaraan dan mutu pogram PKBM namun keseluruhannya itu haruslah dikembangkan selaras dengan dukungan bagi penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengelola PKBM.

Penggunaan kata ‘masyarakat’ juga perlu dipahami secara lebih khusus. Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata ‘masyarakat’ dapat dipahami dalam arti yang lebih luas misalnya ‘masyarakat Indonesia’ tetapi dapat juga dipahami dalam arti yang lebih sempit dan terbatas, misalnya ‘masyarakat RT-06 RW 05 Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung’. Kata ‘masyarakat’ dalam PKBM lebih dimaksudkan pada pengertian masyarakat dalam arti lebih sempit dan terbatas.

Dalam bahasa Inggris, padanan katanya adalah *community*, atau diterjemahkan menjadi ‘komunitas’. Pemahaman ini memberi implikasi bahwa PKBM haruslah merupakan institusi yang dibangun dan dikembangkan dalam suatu masyarakat yang bersifat terbatas dan bersifat setempat, bersifat lokal. Batasan ini dapat dikategorikan dalam batasan geografis maupun batasan karakteristik.

Batasan geografis dapat berarti dalam suatu wilayah tertentu seperti suatu Kampung atau Dusun tertentu, suatu Desa atau Kelurahan tertentu ataupun suatu Kecamatan tertentu. Batasan Karakteristik dapat saja mengacu pada suatu kelompok masyarakat yang mengalami suatu persamaan permasalahan tertentu misalnya suatu kelompok masyarakat yang karena permasalahan sosial tertentu sama-sama berada dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tertentu dan sebagainya. Dengan pemahaman ini tentu sulitlah

dipahami adanya suatu PKBM yang mengklaim PKBM skala yang terlalu luas wilayah cakupannya misalnya skala propinsi atau skala nasional.

2. Dasar Hukum Pengembangan PKBM

PKBM, sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dalam pengembangannya memiliki landasan konstitusional (Kemendikbud, 2011: 6), adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- h. Komitmen Internasional: (1) Deklarasi dunia tahun 1997 tentang Pendidikan Orang Dewasa atau CONFINTEA V, *Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future*.; (2) Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All); (3) Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-

MDG's); (4) Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.

3. Fungsi dan Asas PKBM

PKBM sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, secara kelembagaan mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: (a) Sebagai tempat kegiatan belajar; bagi warga masyarakat, artinya tempat bagi warga masyarakat untuk menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat didayagunakan secara tepat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat; (b) Sebagai tempat pusan berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, artinya bahwa PKBM diharapkan dapat digunakan sebagai tempat pertukaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, sehingga menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri; (c) Sebagai pusat dan sumber informasi, artinya bahwa PKBM merupakan tempat warga masyarakat untuk menanyakan berbagai informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PKBM dapat menyediakan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional untuk bekal hidup (life skill); (d) Sebagai ajang tukar menukar keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dengan prinsip saling membelajarkan melalui diskusi-diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi; (e) Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta nilai-nilai tertentu bagi masyarakat yang membutuhkannya. disamping itu dapat juga digunakan untuk berbagai pertemuan bagi penyelenggaraan dan nara sumber baik intern maupun ekstern; (f) Sebagai loka belajar yang tidak pernah berhenti, artinya PKBM merupakan suatu tempat yang

secara terus menerus digunakan untuk proses belajar mengajar (BPKB Jatim, 2000, 8). Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwasanya fungsi dari PKBM dalam masyarakat sebagai proses kegiatan belajar yang bersifat non-formal untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

C. Pengembangan PKBM untuk Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mewujudkan visi pengembangan PKBM sebagai *Centre of Excellence*, dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akan menjadi lebih bermakna sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja PKBM agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dengan memberdayakan program-program PLS yang dikelola oleh PKBM, memberdayakan para warga belajar dan membangkitkan potensi kelompok sasaran atau warga belajar agar mereka memiliki kemampuan mengendalikan kekuatan lingkungannya. Oleh karena itu agar PKBM dapat mengembangkan hal diatas, (Zainuddin Arif, 2003), menyarankan adanya beberapa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan kelompok belajar, yang berfungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari: (1) membentuk kelompok kecil sebagai perencana; (2) membentuk kelompok belajar; (3) memilih dan melatih tutor; (4) mengaktifkan kelompok belajar; (5) mengadakan pertemuan fasilitator/tutor; (6) mendorong dan membantu kegiatan kelompok belajar; (7) menciptakan hubungan antar kelompok dan (8) melakukan evaluasi.

Di bawah ini diilustrasikan pola pengembangan PKBM dalam bentuk perintisan/persiapan dan pendirian, (Kemendikbud, 2011: 10-13), sebagai berikut:

1. Perintisan/Persiapan Pembentukan PKBM

Inisiatif pembentukan PKBM dapat berasal dari pimpinan masyarakat formal, pimpinan, non formal masyarakat, tokoh

masyarakat/pemuka masyarakat, kelompok masyarakat ataupun dari anggota masyarakat sendiri. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk merintis PKBM, antara lain:

- (a) Para inisiator pembentukan PKBM terlebih dahulu mempelajari tentang bagaimana mengelola PKBM, baik dengan mempelajarinya sendiri maupun dengan mengikuti suatu pelatihan;
- (b) Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki PKBM dan mendorong mereka agar berpartisipasi dalam pembentukan PKBM maupun dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PKBM;
- (c) Menghimpun data dasar masyarakat. Data dasar masyarakat adalah sejumlah informasi atau keterangan tentang masyarakat seperti data desa tentang perekonomian secara umum, kesehatan, dan sanitasi (kebersihan lingkungan), tingkat pendidikan masyarakat, Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, sumber daya alam, tokoh-tokoh penting masyarakat, mata pencaharian masyarakat, bidang usaha yang berhasil di masyarakat dan data lain yang sekiranya diperlukan;
- (d) Melakukan identifikasi kebutuhan (*need assessment*) yaitu mencari, menemukan, mengumpulkan, menelaah data dan informasi tentang kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PKBM benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (e) Sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Setempat; Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat setempat tentang perlunya pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai tempat/wadah pusaran pembelajaran dan pemberdayaan berbagai potensi masyarakat yang dapat dikembangkan, tempat masyarakat

8

Strategi Pengembangan PKBM Mandiri, Unggul dan Kompetitif Menuju Desa Peradaban Berbasis Pendidikan

A. Perlunya Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu institusi pendidikan nonformal yang tumbuh dan berdiri atas prakarsa masyarakat akan dapat berkembang manakala penyelenggara program maupun para pemangku kepentingan memiliki kesamaan persepsi dalam peningkatan kualitas hidup warga masyarakat yang mengalami marginalisasi.

PKBM sebagai institusi Pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pembangunan selalu berkaitan erat dengan perkembangan jaman serta selalu memunculkan persoalan baru yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya namun harus tetap disikapi dengan bijak dan elegan. Bangsa ini sudah hampir terlambat untuk berubah terutama untuk merubah mutu pendidikan yang kian hari kian terpuruk. Setiap lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar karena proses dan hasil pendidikan yang telah dicapainya.

Berbicara mengenai mutu, maka mutu pendidikan akan dipersalahkan bila tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mutu pendidikan merupakan hal tentang dua sisi yang sangat penting yaitu proses dan hasil. Mutu dalam proses pendidikan melibatkan berbagai input seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru),

sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dukungan administrasi, berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang fair dan nyaman untuk belajar. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu.

Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (Kemdiknas) beberapa tahun terakhir menyusul hasil penilaian internasional, seperti PISA 2003 (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Sciences Study), yang menempatkan Indonesia pada posisi buntut dalam hal mutu pendidikan.

Lebih dari itu, laporan terkini dari UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 juga masih menempatkan Indonesia pada ranking ke-108 dari 177 negara, jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (25), Brunei Darussalam (34), dan Malaysia (61).

Berbagai terobosan dan kebijakan penting telah diambil oleh kemdiknas dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu sejalan dengan komitmen yang digariskan oleh UNESCO melalui program Education for All (EFA). Namun hasilnya masih memprihatinkan.

Oleh karena itu peningkatan mutu dan kualitas PKBM menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu.

Dalam bagian ini mencoba menganalisis dan mengupas permasalahan serta menawarkan gagasan baru dalam pengembangan PKBM menuju PKBM yang mandiri, unggul dan kompetitif. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi para pemangku kebijakan, pengelola dalam membawa PKBM yang lebih berdaya.

B. Analisis Potensi dan Masalah dalam Pengembangan PKBM

Sebagai institusi yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat, PKBM memiliki potensi sebagai institusi yang mandiri. Meskipun awal berdirinya banyak PKBM yang bergantung pada bantuan dan dana block grant dari pemerintah, dalam jangka panjang diharapkan pada sebagian besar PKBM akan tumbuh kemandirian, dalam hal ini peran dominan pemerintah yang selama ini menjadi semakin berkurang dan lebih pada peran fasilitasi akan dapat berjalan seiring dengan kemandirian PKBM. PKBM akan berdiri kokoh atas keswadayaan masyarakat.

1. Potensi Pengembangan PKBM

Beberapa potensi PKBM yang dapat dikembangkan, pertama, seiring dengan posisi sebagai institusi pendidikan yang berbasis pada masyarakat (community based education) yang dalam aktualisasinya dicirikan adanya: (a) dukungan dari masyarakat dalam berbagai bentuk; (b) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (c) kemitraan di mana warga masyarakat ikut menjalin hubungan yang sejajar dengan pengelola program; (d) kepemilikan di mana warga masyarakat ikut mengendalikan semua keputusan yang berkaitan dengan program-program pendidikan luar sekolah.

Kedua, dilihat dari layanan program yang dapat dilaksanakan PKBM memiliki potensi untuk menyelenggarakan seluruh program pendidikan nonformal dan informal, yang mencakup: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran masyarakat PKBM dapat menerapkan prinsip belajar kelompok dimana warga belajar bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama warga belajar

yang lain dalam suatu kelompok belajar, juga potensi pembelajaran dengan pendekatan integratif, dimana suatu proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada pembelajaran satu aspek tertentu saja dari sekian banyak aspek kehidupan manusia tetapi suatu proses yang memadukan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu layanan program pembelajaran pendidikan luar sekolah.

Keempat, potensi lain yang dimiliki PKBM sebagai institusi pembelajaran masyarakat adalah kemampuan dalam bekerjasama secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai institusi lain yang ada di dalam masyarakat baik yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan maupun aktivitas lain yang memiliki tujuan yang sejalan dengan PKBM yaitu membangkitkan masyarakat dari berbagai ketertinggalan, dan kelima, PKBM dalam proses pembelajaran menempatkan sasaran warga belajar masyarakat sebagai subjek didik yang harus aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi dirinya dan masyarakat, PKBM memposisikan warga belajar sebagai individu yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan diri, masyarakat dan institusi PKBM itu sendiri, dan terakhir sebagai institusi yang berada di dalam masyarakat dan didirikan dengan maksud untuk membelajarkan masyarakat, maka kehadiran PKBM berpotensi untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan dalam arti dapat membantu kelompok-kelompok marginal agar mereka mampu memiliki potensi yang seimbang dengan kelompok-kelompok lainnya yang lebih mampan kehidupan sosial ekonominya, dengan menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau sehingga dapat terangkat derajatnya, hak-haknya baik sosial maupun ekonomi.

Banyaknya potensi yang dimiliki akan berbuah menjadi kenyataan atau sebaliknya tetap potensi sangat tergantung dari pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh para pengelola PKBM maupun para tenaga pendidik maupun kependidikan yang terlibat di dalamnya maupun keperdulian dari berbagai pihak termasuk pemerintah.

2. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan PKBM

Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki PKBM sebagai tempat yang terorganisasi di mana warga belajar masyarakat dapat belajar di tempat itu sekaligus merupakan tempat belajar yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta mengembangkan segala potensi warga belajar dan masyarakatnya, memiliki perbedaan dalam perkembangannya.

Perbedaan tersebut antara lain: Pertama; Perbedaan perkembangan PKBM lebih disebabkan oleh perbedaan dalam komponen-komponennya: (1) adanya perbedaan dalam kepemilikannya (ada PKBM perorangan, yayasan, pondok pesantren, LSM, desa, dsb); (2) perbedaan sumberdaya manusia yang mengelolanya; (3) perbedaan karena kemampuan dana, walaupun sampai saat ini sebagian besar PKBM memperoleh dana dari pemerintah; dan (4) perbedaan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki masing-masing PKBM dan kelima, perbedaan dalam jumlah dan jenis layanan program pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM.

Atas dasar karakteristik pengelolaannya, PKBM dalam diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu: (1) PKBM yang berbasis kelembagaan, yaitu PKBM yang inisiatif pembentukan dan pengelolaan dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah, ciri utamanya semua sarana dan prasarana termasuk dana disediakan oleh lembaga; (2) PKBM yang berbasis komprehensif, yaitu PKBM yang inisiatif pembentukannya dari lembaga namun dalam pengelolaannya dilakukan secara bersama dengan masyarakat sekitarnya; dan (3) PKBM berbasis masyarakat, merupakan PKBM yang inisiatif pembentukan, pengelolaan dan penyelenggaraannya dari dan oleh masyarakat, unsur lain lebih berperan sebagai mitra dan fasilitator.

Kedua; Adanya perbedaan pengelolaan maupun faktor lainnya menyebabkan masalah dan tantangan yang dihadapi masing-masing PKBM juga berbeda. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdjazifah ER, dkk pada tahun 2005, Terdapat sejumlah permasalahan internal yang dihadapi PKBM dilihat dari tingkat pencapaian standar mutu minimal yang perlu dicapai antara lain: (1) kurangnya kemampuan PKBM untuk mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan setempat, hampir seluruh PKBM melaksanakan program-program pembelajaran yang ditawarkan oleh pemerintah; (2) beberapa pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah yang telah disediakan jarang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, berakibat munculnya permasalahan dalam pelaksanaan; (3) tingkat pencapaian mutu minimal penyelenggaraan PKBM belum tercapai baik pada kegiatan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, pemberian layanan informasi, perluasan jaringan kerjasama, maupun pada kegiatan pembinaan tenaga kependidikan.

Permasalahan ini didukung oleh temuan lain di Jawa Barat, sebagaimana Hiryanto (2009: 4) menjelaskan antara lain: (1) pendirian PKBM diduga kuat bukan didasari pertimbangan kebutuhan atau kesadaran para pemakrasanya akan perluasan hak-hak pendidikan masyarakat, tetapi sebagai respon untuk bagaimana membuat wadah untuk menampung kucuran *block grant* dari pemerintah. Yang penting ada wadah dulu, bagaimana praktek pendidikan akan dijalankan itu lain soal yang lain lagi; (2) rendahnya kepemilikan komunitas, menurut data, PKBM didominasi oleh pegawai negeri, orang-orang yang pekerjaan utamanya menjadi TLD, penilik dan guru mendominasi kepengurusan baik ditingkat ketua (53,68%) maupun sekretaris (56,5%), dimana yang menarik ada jumlah profesi rangkap. Guru yang *notabene* sudah mendapat gaji dari pekerjaan mengajarnya di sekolah formal ikut terlibat dalam kepengurusan PKBM (21, 73 % pada posisi ketua dan 27,53 % pada posisi sekretaris). Apa artinya?. Artinya menguatkan temuan

pertama bahwa pendirian PKBM patut diduga kuat diprakarsai oleh orang-orang yang mempunyai akses informasi yang cukup besar terhadap kebijakan-kebijakan baru pendidikan, termasuk didalamnya tata cara mengakses *block grant* dan semacamnya. Atau sekurang-kurangnya informasi tentang hal ini lebih banyak tersebar di kalangan terbatas, yaitu “orang-orang dalam” Kemendikbud. Dimana gejala ini diperkuat dengan siapa yang mengelola atau bentuk organisasi PKBM, sebanyak 56,6 % PKBM dikelola oleh yayasan, yang *notabene* bentuk organisasi yang kepemilikannya berada di tangan segelintir orang, disamping itu sebagian besar PKBM masih berbasis kelembagaan, belum berbasis masyarakat. (3) rendahnya relevansi program dengan kebutuhan masyarakat. Program-program PKBM umumnya adalah “program-program paket” yang sudah distandarisasi, seperti Keaksaraan Fungsional, Paket A, Paket B, Paket C, Beasiswa kursus, KWD, KWK, KPP dan lain-lain yang serupa itu. Program-program ini memang yang disarankan untuk dilakukan PKBM jika ingin mengakses dana *block grant*. Cukup banyak juga materi-materi belajar tentang ketrampilan, tetapi hampir semua jenis-jenis ketrampilan yang berorientasi teknis produktif, dan semua program baik paket maupun keterampilan masih jauh dari hubungannya dengan potensi desa/daerah.

Permasalahan lain bahwa, pendidikan nonformal masih sangat sulit untuk dipecahkan, apabila hanya mengandalkan pemerintah khususnya Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, sampai pada Penilik PNF, sehingga peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini masih sangat diperlukan pada saat ini dan kedepan menurut Kamil, Mustofa. (2009: 156-157). Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami atau kenal dengan pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah, baik masyarakat pendidikan (akademis) maupun masyarakat lainnya. Peningkatan partisipasi masyarakat tidak sebatas sebagai sasaran pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah) akan tetapi yang paling penting adalah sebagai

sumber belajar, sebagai fasilitator pembelajaran atau sebagai pengelola pembelajaran. Kominkan independent 100 % didirikan dan diprakarsai oleh masyarakat (tokoh masyarakat), begitu pula dalam pengelolaannya. Sedangkan Kominkan yang dibawah naungan pemerintah Kota 60% dibiayai pemerintah Kota dan sisanya dibiayai masyarakat, sedangkan dalam pengembangan pembelajaran hampir 90 % dibiayai masyarakat dan pengelola pembelajaran. Ini membuktikan betapa besar peran masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan Kominkan.

Belajar dari kasus tersebut, seperti diketahui PKBM 100 % milik masyarakat (lembaga-lembaga/organisasi masyarakat/ LSM dll), meskipun ada beberapa PKBM yang mendapat grant dan voucher dari pemerintah dalam pengelolaan pembelajaran namun demikian peran pemerintah tidak begitu besar atau prosentasenya masih di bawah 20 % saja. Kondisi ini membuktikan peran masyarakat dan pemerintah sudah begitu baik terhadap pengelolaan PKBM namun peran-peran yang diberikan pada saat ini masih belum maksimal. Masih banyak ditemukan PKBM yang didirikan seadanya, atau PKBM papan nama tanpa warga belajar, PKBM didirikan hanya untuk menyerap anggaran pemerintah saja, PKBM didirikan oleh para penilik Dikmas yang pengelolaan pembelajarannya tidak jelas. Warga belajar PKBM begitu banyak dan partisipasi masyarakat begitu baik namun melihat kualitas sarana prasarana yang ada sangat tidak memungkinkan sebagai tempat pembelajaran pendidikan nonformal. Kasus-kasus seperti ini perlu dibenahi dengan sebaik-baiknya agar masyarakat percaya terhadap keberadaan pendidikan nonformal sebagai lembaga (institusi pendidikan) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dan kualitas hidup masyarakat umumnya.

Selain permasalahan yang dihadapi, PKBM juga menghadapi tantangan agar PKBM ke depan lebih berfungsi dalam melaksanakan program-program pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan yang berasal dari internal maupun eksternal yang harus dipertimbangkan

dan dicari pemecahannya dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja PKBM. Secara internal PKBM menghadapi tantangan berupa rendahnya kemampuan para pengelola PKBM pada umumnya untuk mengembangkan PKBM sebagai institusi PLS yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan geografis maupun perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi, yang berakibat PKBM menghadapi kendala dalam menghasilkan berbagai program pendidikan luar sekolah yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya, dimana kemampuan merencanakan dan mengembangkan program-program PLS yang dikembangkan sendiri belum merata dimiliki oleh para pengelola dan pemangku kepentingan lain di tingkat PKBM. Selain itu sebagaimana temuan di Jabar, PKBM menghadapi tantangan masih kuatnya ketergantungan terhadap bantuan dan dukungan dana dari pemerintah melalui berbagai hibah yang diberikan, tantangan lain adalah rendahnya kemampuan PKBM dalam membuat dan mengajukan proposal kegiatan yang dapat didanai.

Terdapat kecenderungan bahwa dana hibah jatuh ketangan PKBM yang memang memiliki kemampuan untuk membuat dan mengajukan usulan (proposal) kegiatan, sering terjadi PKBM yang memperoleh dana hibah dari tahun ke tahun itu-itu saja, oleh karena itu tantangan PKBM pada umumnya adalah meningkatkan kemampuan bersaing dengan PKBM lain dalam perolehan dana hibah dari pemerintah maupun founding lainnya.

Sedangkan tantangan berat lain yang dihadapi PKBM dalam jangka panjang adalah meningkatkan mutu pengelolaan dan mutu program pendidikan luar sekolah yang ditawarkan kepada masyarakat. Dimana dewasa ini konsep mutu menjadi suatu keharusan, yang sering diterapkan dalam dunia bisnis dan pendidikan, seperti adanya Akreditasi Lembaga, sertifikasi ISO 9000-200/ dan sebagainya.

Secara rinci menurut Yoyon Suryono (2007: 34) PKBM menghadapi persoalan peningkatan mutu yang mencakup; (1) apakah program-program pembelajaran yang dikembangkan sudah

diarahkan pada kepentingan warga belajar atau para pelanggan lainnya (stakeholder), (2) apakah semua pemangku kepentingan PKBM sudah terlibat secara sungguh-sungguh dalam pengelolaan dan pengembangan PKBM, (3) apakah dalam mengelola PKBM dan menyelenggarakan program pembelajaran penilaian (evaluasi) sudah dilaksanakan dengan semestinya, PKBM tidak mungkin memenuhi standar mutu yang sudah ditentukan oleh masyarakat tanpa memiliki alat ukur untuk menilai kemajuan hasilnya, (4) apakah semua pihak yang berkepentingan dengan PKBM sudah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu dan (5) apakah upaya perbaikan dan peningkatan mutu pengelolaan PKBM dan penyelenggaraan program-program pembelajaran sudah dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pengembangan PKBM berkait juga dengan pengembangan kelompokkelompok belajar yang sudah ada di dalam PKBM itu sendiri, oleh karena itu tantangan penting lain yang dihadapi oleh PKBM adalah bagaimana mengembangkan kelompok-kelompok belajar itu yang mengarah pada meningkatnya kinerja kelompok belajar yang ditandai dengan (1) meningkatnya partisipasi warga belajar, (2) terjadinya proses demokrasi dalam kehidupan kelompok, (3) meningkatnya kesetaraan kedudukan pada semua pemangku kepentingan yang memungkinkan terjadinya proses pembebasan pada warga belajar dan (4) meningkatnya derajat kehidupan warga belajar dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan menjadi kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat meningkatkan derajat kehidupannya.

C. Strategi Pengembangan PKBM Mandiri, Unggul dan Kompetitif

Pengembangan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal dan sekaligus institusi pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri banyak konsep dan teori yang dapat dipergunakan baik melalui pendekatan pendidikan maupun

pemberdayaan masyarakat.

Salah satu diantaranya, Chambers (Kartasasmita, 1996:142), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yakni bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering* and *sustainable*. Pengertian lain yang disampaikan oleh Tjokrowinoto (dalam Kusnadi, 2006: 219) konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) akan tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety need*).

Sumodingrat (1996: 185) menyatakan, bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

Proses pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi dan kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya dimasyarakat, dengan kata lain proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya..

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (*civil society*), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan

hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya (Tila'ar, 1997: 231).

Berdasarkan kajian diatas, bahwa pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan merupakan hakekat pendidikan itu sendiri, karena apa yang disebut dengan pendidikan termasuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal adalah usaha memberdayakan manusia, memampukan manusia, mengembangkan talenta-talenta yang ada pada diri manusia agar dengan kemampuan/potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan melalui pendidikan/pembelajaran.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.. Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut Yunus (2004: 3), ada lima prinsip dasar yang patut diperhatikan: (1) keperdulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi/ sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan dan (5) mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.

Agar proses pembelajaran yang dilakukan melalui Pendidikan Luar Sekolah, dapat terjadi proses pemberdayaan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) *Need oriented*, yaitu pendekatan yang berorientasi dan didasarkan pada kebutuhan warga masyarakat; (2) *Endegenious*, yaitu pendekatan yang berorientasi dan mengutamakan kesesuaian nilai-nilai keaslian lokal, dengan cara menggali dan

menggunakan potensi yang dimiliki warga belajar; (3) *Self reliant*, yaitu pendekatan yang membangun rasa percaya diri atau sikap mandiri pada setiap warga masyarakat; (3) *Ecologically sound*, ialah pendekatan yang berorientasi, memperhatikan dan mempertimbangkan aspek perubahan lingkungan dan, (4) *Based on structural transformation*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada perubahan struktur sistem, baik yang menyangkut hubungan sosial, kegiatan ekonomi, penyebaran keuangan, sistem manajemen maupun partisipasi masyarakat setempat.

Terdapat beberapa pendekatan yang perlu dipergunakan dalam pendidikan non formal dalam konteks ini pengembangan PKBM, yang menekankan pada proses pemberdayaan antara lain yang dikemukakan oleh Kindervatter dalam Kusnadi (2007: 222) terdiri atas: (1) *Community organization*, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. Hal yang perlu diperhatikan antara lain; (a) Peranan partisipan ikut terlibat dalam kepengurusan atau tugas kelompok; (b) peranan tutor hanya sebagai perantara, pembimbing dan motivator serta fasilitator; (c) metode dan proses mengutamakan metode pemecahan masalah, mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar; (2) *Participatory approaches*, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota dalam seluruh kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin, tokoh masyarakat serta tenaga-tenaga ahli setempat; (3) *Education for justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan serta.

Dari beberapa kajian teoritis, maupun empiris di atas, maka paling tidak terdapat 3 strategi pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan PKBM, yaitu: pendekatan pengembangan kemampuan, pembentukan jaringan dan kemitraan, serta

pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan PKBM.

1. Pengembangan Kemampuan

Pendekatan pengembangan kemampuan, yaitu suatu upaya meningkatkan kemampuan orang dan lembaga secara berkelanjutan, kompetensi dan kemampuannya memecahkan masalah, atau pengertian lain yang sering dipergunakan yaitu suatu pendekatan pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis untuk: (a) memberdayakan individu agar mampu mengubah kehidupannya, (b) menumbuhkembangkan potensi-potensi individu yang pada akhirnya dapat diwujudkan dalam tindakan kolektif, (c) memerangi kemiskinan, penindasan dan deskriminasi dan (d) mewujudkan potensi-potensi manusia melalui penciptaan keadilan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pada pengertian di atas maka pendekatan pengembangan kemampuan, harus ditekankan pada beberapa konsep antara lain: pertama, pengembangan kemampuan dirancang untuk memberdayakan individu yang mampu mewujudkan eksistensi secara mandiri dan kolektif, kedua merupakan upaya untuk membantu sebagian peran negara dalam menciptakan otonomi dan kemandirian masyarakat, ketiga harus selalu mengalami penyesuaian dengan tuntutan lingkungan dan tingkat kepentingannya, keempat, tidak hanya berhubungan dengan finansial tetapi yang jauh lebih penting adalah aspek-aspek yang kurang kasat mata seperti aspek sosial, politik, organisasi dan manajemen dan kelima, pengembangan kemampuan merupakan konsep makro yang dapat diimplementasikan secara berbeda sesuai dengan konteks situasi, tuntutan sosial-politik yang ada

Dalam pendekatan pengembangan kemampuan ada tiga strategi yang dapat dipergunakan yaitu, pendekatan individual, organisasi dan jaringan. Strategi pendekatan individu menekankan pada pentingnya posisi dan peran manusia dalam pembangunan, strategi yang kedua adalah pendekatan organisasi, yang dikenal

dengan pengembangan kelembagaan (*institutional building*), yaitu bagian dari investasi masa depan yang menekankan pada upaya meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja organisasi yang tinggi sebagai gambaran organisasi yang diharapkan atau diidealkan ditandai oleh sejumlah karakteristik organisasi sebagai berikut: (1) menawarkan dukungan bersama dan solidaritas, (2) memperkuat harga diri dan kepercayaan bersama, (3) memperbaiki kapasitas individu untuk melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan melalui tindakan kolektif, (4) berfungsi sebagai forum untuk belajar, (5) mempromosikan diskusi dan analisis persoalan bersama, (6) meningkatkan partisipasi individu dalam berbagai proses politik, (7) mampu melakukan lobi atas masalah-masalah politik yang merupakan kepentingan nyata, (8) memiliki akses terhadap pemerintah dan institusi-institusi yang berpengaruh dan (9) mampu melakukan negosiasi dengan para aktor lain.

2. Pembentukan Jaringan dan Kemitraan

Strategi pendekatan yang kedua, adalah pembentukan jaringan dan kemitraan yang sejalan dengan semakin canggihnya teknologi, karena adanya dua alasan yaitu: untuk membagi dan menyebarkan gagasan dan informasi untuk dapat saling belajar, serta untuk mengintegrasikan pengalaman dan energi para aktor yang terlibat didalamnya agar dapat meningkatkan dampak individu dan kolektivitasnya. Suatu jaringan akan efektif manakala dipenuhinya beberapa hal berikut: (a) adanya pola kemitraan yang saling menghormati serta akses yang sama terhadap sumberdaya, (b) adanya kepentingan bersama antar individu dan antar individu dengan organisasi, (c) adanya kemampuan manajemen jaringan yang baik yang difasilitasi oleh organisasi dengan tetap memperhatikan kebebasan.

Konsep pengembangan kemampuan lebih banyak diterapkan untuk kepentingan reformasi pemerintahan atau birokrasi, namun dapat diterapkan juga untuk pembangunan masyarakat, melalui

PKBM yang memiliki arti sebagai usaha terorganisasi untuk memperbaiki kehidupan suatu komunitas serta peningkatan kemampuan berinteraksi dan berkembang secara mandiri baik dalam hal sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun ketrampilan. Penerapan konsep pengembangan kemampuan untuk pembangunan masyarakat diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengontrol sepenuhnya kehidupan dan lingkungannya, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dan mencari pemecahannya. Dalam penilaian Osborne dan Gaebler, yang dikutip oleh Yoyon Suryono (2007:46), pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan yaitu: (a) masyarakat lebih memiliki komitmen terhadap para anggotanya daripada pemerintah, (b) masyarakat lebih memahami persoalan yang dihadapinya daripada pihak luar, (c) masyarakat lebih fleksibel dan kreatif daripada organisasi lain yang lebih besar, (d) masyarakat mampu menegakkan standar perilaku secara lebih efektif daripada birokrasi atau organisasi swasta lainnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Dimana dalam konsep pemberdayaan ini mengandung dua pengertian, pertama, pemberdayaan merupakan pemberian kekuatan atau kewenangan (to give power or authority to), kedua pemberdayaan adalah memberi kekuatan atau kemampuan (to give ability to or anable), Berdasarkan pengertian diatas Bank Dunia (dalam Syahyuti, 2006), pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan secara individual maupun suatu kelompok suatu masyarakat. Masyarakat yang telah berdaya diindikasikan oleh adanya pemilikan kebebasan dalam pilihan dan tindakan sendiri.

Dalam konteks pendidikan luar sekolah, istilah pemberdayaan masyarakat pertama kali dikemukakan oleh Suzanne Kindervatter (1979), dalam disertasinya yang berjudul: *Nonformal Education as Empowering Process*. Menurut Kindervatter (Zainuddin Arif, 2003),

pemberdayaan merupakan upaya agar masyarakat memperoleh pemahaman dan kemampuan mengontrol kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik agar mereka dapat meningkatkan posisinya dalam masyarakat. Kelompok masyarakat atau individu yang posisinya meningkat ditandai oleh dimilikinya, (a) akses dan peluang yang tinggi, (b) daya tawar kolektif yang tinggi, (3) kemampuan memilih berbagai pilihan, (4) status citra diri dan perasaan positif terhadap identitas dirinya, (5) kemampuan kritis dan kemampuan menggunakan pengalaman untuk menilai potensi yang memberikan keuntungan, (6) legitimasi dalam arti kebutuhan masyarakat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang logis dan adil, (7) mampu menentukan sendiri standar pekerjaan yang dilakukan bersama orang lain dan (8) mempunyai persepsi yang kreatif yaitu mempunyai pandangan yang lebih positif terhadap hubungan dirinya dan lingkungannya.

Dari sudut pandang manajemen, Cook dan Maculay (Zainuddin Arif, 2003), mendefinisikan pemberdayaan sebagai instrumen yang dipergunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggungjawab, dalam arti keterlibatan para anggota dalam pembuatan keputusan dan tanggungjawab. Atas dasar dua pengertian diatas, Zainuddin Arif (2003), menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan usaha untuk memampukan masyarakat kecil yang dianggap kurang berfungsi agar meningkat dan mempunyai kemampuan lebih baik atas peran dalam sistem sosialnya melalui pemberian kewenangan kepada warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

D. Program Pengembangan PKBM Mandiri, Unggul dan Kompetitif

Menganalisis berbagai permasalahan PKBM, teori faktor strategi keberhasilan baik dalam pengembangan program maupun dalam pengelolaan organisasi, maka pembelajaran yang dapat

digunakan untuk pengembangan PKBM saat ini dan ke depan, terdapat 8 kunci sukses faktor (key success factor), di antaranya; (1) kelembagaan, (2) manajemen, (3) ketenagaan (SDM); (4) sarana/parasana, (5) dana, (6) kerjasama, (7) partisipasi masyarakat; (8) pembelajaran,

1. Pengembangan Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan suatu organisasi dituntut adanya: (a) legalitas formal dalam bentuk Badan Hukum dan Kebijakan lainnya; (b) kejelasan struktur organisasi beserta tugas-tugasnya merupakan faktor esensial dalam perencanaan dan pengelolaan PKBM efektif; (c) struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Dwidjowijoto (2008:447) menyatakan: "bahwa di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan atau pemerintah". Menurut Edward III (1980:25) ada 2 indikator penting dalam struktur organisasi yaitu: "standar operasi prosedur (SOP) dan fragmentasi organisasi". Petrama. Standar operasi prosedur sebaiknya dibuat secara sederhana namun tetap tidak mengurangi makna sehingga tidak menyulitkan aparat pelaksana. Standar operasi prosedur merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan standar operasi prosedur, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan efisien. Kedua, Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. Fragmentasi organisasi terutama berasal dari tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti legislatif, kelompok-kelompok

kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, peraturan-peraturan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi.

Kewenangan dalam organisasi/kebijakan organisasi. Menurut Basu Iwastha (2000:114), wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sementara itu Henry Fayol (Agus Sabardi, 1997: 106) menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan demikian kewenangan berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Kejelasan struktur organisasi, birokrasi, kewenangan dalam organisasi kelembagaan PKBM akan berdampak pada harmonisnya sistem pengelolaan PKBM terutama faktor-faktor yang melingkupi di dalamnya. Di samping itu pula struktur organisasi dan birokrasi yang jelas akan memudahkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat baik sebagai sasaran PKBM maupun sumberdaya PKBM. Oleh karena itu struktur organisasi dan birokrasi PKBM harus dikembangkan dengan mengacu pada sistem administrasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, luas area jangkauan PKBM, kondisi sosial ekonomi, dan karakteristik sosio/budaya masyarakat setempat di mana PKBM dikembangkan.

Di bawah ini diberikan sebuah contoh struktur organisasi yang menjangkau berbagai kebutuhan pengembangan/pembangunan masyarakat yang memiliki kaitan erat dengan pendidikan masyarakat (pendidikan nonformal dan informal), namun demikian struktur organisasi yang dikembangkan PKBM harus memperhatikan pula luas atau sempitnya jangkauan program yang akan dikembangkan. Mungkin saja contoh ini tidak cocok bagi PKBM kecil, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program. Dalam struktur tersebut tergambarkan PKBM bukan hanya berperan dalam mengembangkan pendidikan nonformal

Daftar Pustaka

- A. Suryadi (1983) *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Alumni.
- Abdillah, Masykuri. (1999) "Islam dan Masyarakat Madani" dalam [http://komas.com/kompas Dcetak/9902/27/opini/isl04.htm](http://komas.com/kompas/Dcetak/9902/27/opini/isl04.htm). (diakses 3 Mei 2003).
- Adrian Payne, (1997) *Pemasaran Jasa*, Cetakan I, Yogyakarta: Andi.
- Agoes, Kusnadi, Chandar. (2007) *Teori dan Manajemen Stres*. Malang: Taroda.
- Al-Qardlawi, Yusuf, (2001) *Sunnah, Ilmu pengetahuan, dan Peradaban*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Alvin Toffler (1980), *The Third Wave*, England.Penguin Book.
- Amalia, Ria. 2002. *Hubungan Antara Minat Belajar Siswa dan Pola Asuh Orang Tua dengan Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Ketrampilan Pada Siswa Kelas II Taman Dewasa Ibu Pantiwiyatan Tamansiswa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2001-2002*. Yogyakarta : UST.
- Ambar Teguh Sulistyani, (2004) "Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan", Yogyakarta.Gaya. Gava Media.
- Anwar Prabu Mangkunegara, (2000) *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Axinn, George (1976). *Nonformal Education and Rural Development East Lansing*: Michigan State University.

- Azra, Azyumardi. (2002) "*Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*" Makalah disampaikan pada *Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan* di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia.
- Beebe, James. (1995) *Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal*. Human. Organization, vol. 54, No. 1, Spring 1995.
- Bennett, N. Wood, L. dan Rogers, S. (1993). *Teaching Through Play*. Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bowen, et al, (1992). *Theories of Education*. New York: Wiley & Son.
- Boyle, P.G. (1981). (1981). *Planning Better Program*. New York: Mc GrawHill.
- Brautigam, Deborah. (1995). "*Reducing Poverty: Lesson from Taiwan*". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Brown, Donald. (1995). "*Poverty-Growth Dichotomy*", dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (ed.). *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Buchori, Mochtar. (1993) "*Pengantar*". Walter Fernandes dan Rajesh Tandon (eds.) *Riset Partisipatoris-Riset Pembebasan*. Penyunting: Wardaya dan Hardiman. Jakrta: Gramedia Pustaka Umum.
- Catanese, J.A. and J.C. Snyder. (1986) *Pengantar Perencanaan Kota*. Penyunting: Sussongko. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Chambers, Robert. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.

- Coben, Diana. (1998) *Radical Heroes: Gramsci, Freire and the Politics of Adult Education*. New York: Garland Publishing Inc.
- Coombs, Phillip H., and Ahmed, Manzoor (1978). *Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*. Baltimore: The John Hopkin Press.
- Cunningham, P.M. (1994) "Community Education and Community Development" dalam *The International Encyclopedia of Education*, editor kepala Torsten Husen dan T. Neville Postlethwaite, Vol. II. Oxford: Pergamon.
- Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.
- UNDP. *Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB* (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.
- Dasgupta, Partha, (1993), *An Inquiry into Well-Being and Destitution*; New York: Oxford University Press.
- Davidoff, Paul. (1965). "Advocacy and Pluralism in Planning". Journal of the American Institute of Planners.
- Deklarasi dunia tahun 1997 tentang Pendidikan Orang Dewasa atau CONFINTEA V, *Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future*.
- Deklarasi dunia tahun 1997 tentang Pendidikan Orang Dewasa atau CONFINTEA V, *Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future*.
- Drost, J. (1988) *Mengajar adalah Mendidik*. Kompas, 2 Mei 1998.
- Dutton, J. M., and Jackson, S. E. (1987). "Categorizing Strategic Issues: Links to Organizational Action. Academy of Management Review, 12.

- Fairchild, Henry Pratt (ed.). (1977). *Dictionary of Sociology*. Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams & Co.
- Fakih, Mansour dan Toto Rahardjo, (2005) "Pendidikan Yang Membebaskan" dalam <http://www.fppm.org/Info/pendidikanygmembebaskan.htm> (diakses 9 Nopember 2012).
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) "*Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Firdaus M.Yunus (2004) *Pendidikan berbasis realitas social* Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Freire, Paulo. (1985). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES: Yogyakarta.
- Freire, Paulo. (2000). *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, John. (1992) *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Hasbullah. (1997). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hodgson, Marshall G. S. (1974) *The Venture of Islam* Chicago & London: The University of Chicago Press.
- <http://www.scribd.com/doc/7174661/uk-no-20-thn-2003-ttg-sisdiknas>.
- Idi, Abdullah, dan Suharto, Toto, (2006) *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ife, Jim (1995) *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Australia-Sydney: Longman.
- Ihsan, H. Fuad. (1995) *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Ikapi.
- Jamasy, Owin. 2004 "Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan". Bumi Putera: Jakarta.

- Jim Cummis (2005) *Promosi Penjualan* Terjemahan: Hesti Widyaningrum Jakarta: Penerbit PPM.
- Joesoef, Daoed. (1991). *"Krisis Metafisik Dalam Ilmu Pengetahuan", dalam Saswinadi Sasmojo et al.(ed.). Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.* Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung.
- Kamil, Mustofa. (2009) *Pendidikan Nonformal: Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang.* Bandung: Alfabeta.
- Kamil. Mustofa,.(2007). *Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Nonformal dalam Membangun Kemandirian Warga Belajar* , dalam Jurnal Ilmiah Visi Vol 2, No. 2-2007.
- Kamil. Mustofa, (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi).* Bandung: Alfabeta.
- Kartasasmita, (1995) *Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri: Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi dalam Pembangunan;* Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 15 April 1995.
- Kartono, Kartini (1997) *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti.* Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartono, R.Kartini. (1992). *Pengantar Ilmu Mendidik Teori.* Bandung: Mandar Maju.
- Keith Davis (1985) *Human Behavior at Work: Organizational Behavior,* Jakrta: Kartajaya.
- Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All).

- Khan, A.M. dan Suryanata, K. (1994) *A review of participatory research techniques* Yogyakarta. Pustaka Kehutanan Masyarakat.
- Kindervatter, S. (1979), *Non-Formal Education as an Empowering Process with Case Studies from Indonesia and Thailand*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kleis (1974), *Case Studies in Nonformal Education*. East Lansing: Michigan State University.
- Koentjaraningrat, (1982). *Kebudayaan, Mentalitas, Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- kompas.com Dcetak/0103/14/opini/pend 04.htm. Artikel ini telah dimuat pada harian Kompas, 14 Maret 2001. (Diakses 3 Mei 2003).
- Le Roy, R., De Vierde Macht, (1972) alih bahasa *Hukum Tata Negara* Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Lenski, Gerhard Emmanuel. (1978) *Human Societies: an Introduction to Macrosociology*. Kogakusha: McGraw-Hill.
- M.J.Langeveld (1969) *Baknote Teoretische Paedagogiek* Groningsen: Woltrers, Noordhof.
- Maarif, Ahmad Syafii. (tt.) "Ketika Pendidikan Tidak Membangun Kultur Demokrasi".
- Macahsin, (2007) *Bahan Kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam semester I MKPI/AP*, Yogyakarta: Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga.
- Magnis-Suseno, Franz. (1996) "Demokrasi: Tantangan Universal" dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taber (Eds.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Cet. I; Jakarta: Paramadina.
- Michael W. (1995) "Community-Based Organizations and the Delivery of Lifelong Learning Opportunities" <http://www.ed.gov/pubs/PLLIConf95/comm.html>, Tulisan ini merupakan Kertas Kerja

- Komisi yang disampaikan pada Lembaga Nasional Pendidikan Tinggi, Perpustakaan, dan Pendidikan Seumur Hidup, Kantor Riset dan Peningkatan Pendidikan AS, Departemen Pendidikan, Washington, D.C., April 1995. (Diakses 3 Nopember 2012).
- Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Yusuf, R. (1979) *Distilasi Asam Oleat dari Minyak Inti Sawit*, Jurnal Saintek, 24 (2) : 55 – 58.
- Murphy, Sharon (2001) *"Informing Our Practice: A Case Study to Interrogate and Seek Critical Foundation for Community-Based Education"*, Disertasi Ph.D. yang diajukan pada Claremont Graduate University dan San Diego State University.
- Nasikun. (1995) *Sistem Sosial Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution. S (1999), *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Natsir, M, (1973) *Kapita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nielsen, Dean. (2001) *"Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia"* dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Nursanti, Tinjung Desi, (2002), *Strategi Terintegrasi Dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia yang Efektif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Paulston, Ronald G. (1972). *Nonformal Education: An Annotated Bibliograph*. NewYork: Praeger.
- Pearce II, J.A, and Robinson Jr, RB. (1994). *Strategic. Management: Fomulation, implementation and Controlo*. 4ft edition.
- Peres, Shimon, (2000) *"Melibatkan diri dalam Tanggung Jawab Sejarah*

- dan Tantangan Masa Depan," dalam Shaping Globalisasi.
- Purnama, N. 2000. *Membangun Menurut. Organisasi Industri Psikologi Amerika* (Mitrani, Palziel, and Fitt, 1992) Polemik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ranis, Gustav. (1995) *"Reducing Poverty: Horizontal Flows Instead of Trickle Down". Uner Kirdar dan Leonard Silke (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment.* New York: New York University Press.
- Ryan, J (ed) (1972). *Planning Out-of School Education for Development.* Report of Seminar, Unesco: International Institute for Educational Planning.
- Samuel Bowles dan Herbert Gintis (1976), *Schooling in Capitalist America* Nevada: Pergamon Press.
- Samuel Huntington (1993), *"the Clash of Civilization"*, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3. H. 22-49.
- Sanaky, Hujair AH, (2003) *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania Pres.
- Sanjaya, Wina, (2006) *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.
- Schuler, Randal S. dan Jackson, Susan E, (1996,) *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke 21, Jilid 2, Edisi Keenam*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Setyawan, Ignatius Roni, (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis: Repositioning Peran Perilaku Plus Kompetensi serta Peran SDM Strategis*, Yogyakarta : Amara Books.
- Shadily, Hassan. (1983). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia.* Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. (1996) *Jeram-Jeram Peradaban Muslim.* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sihombing, U. (1972). *Pendidikan Luar Sekolah: Masalah, Tantangan,*

- Peluang*. UNESCO Learning to Be: The world of education today and tomorrow, Unescoand Harrap.
- Simkins, Tim (1976). *Non Formal Education and Development*. Mencester: Monografis.
- Slamet (2003) *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Smucker, Orden C. (1955) "The Community Approach to Education" dalam Wilbur B. Brookover (Ed.), *A Sociology of Education*. New York: American Book Company.
- Soedijarto. (1997) *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21*. Jakarta: Proyek Perencanaan Terpadu dan Ketenagaan Diklusepora.
- Soekanto, Soerjono. (1999) *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Edisi Keempat Cet. XXVII; Jakarta: Rajawali Pers.
- Srinivasan (1990) *Beberapa Pandangan Mengenai Pendidikan Non Formal Bagi Orang Dewasa*. Bandung BPKB Lembang.
- Sudjana, D. (1988). *Segi-segi Sistemik Pengembangan Pendidikan Nonformal Menjelang Abad Ke-21* IKIP Bandung; Panitia Konvensi Pendidikan Nasional Indonesia ke-1.
- Sudjana, D. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Falah Production.
- Suharni, (2011) <http://www.pustakaskripsi.com/hubungan-partisipasi-orang-tua-dengan-prestasi-belajar-ipa-biologi-siswa-kelas-v-pada-sd-inpres-rappokalling-2-makassar>. (Diakses tanggal 4 Nopember 2012).
- Sumardjo. 1999. "Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat". Disertasi Doktor. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

- Sumodiningrat, G. (1996). *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA.
- Supriadi, Dedi. (2000) “*Antara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar: Di Balik Kebijakan Ada Konstruk Berpikir*”, Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000, No. 3.
- Supriyoko, Ki, (2007) *Kuliah Politik Pendidikan Nasional Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Sessi ke-11.
- Suryadi, Ace dan Tila’ar, H. A. R., 1994. ... 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda. Karya.
- Suryadi, Ace. (2007) *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Suryadi, Ace. 2007. *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Sutarto, Joko. (2007) *Pendidikan Nonformal (Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, & Pemberdayaan Masyarakat)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Theodore W. Schultz, (1975) “*The Value of the Ability to Deal with Disequilibria*”, *Journal of Economic Literature* 13 (September 1975): 827-46.
- Tilaar, H.A.R. (2002) *Pendidikan dan Masyarakat madani Indonesia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R., (2002) *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Ulrich. (1991) *Human Resource Champions: the next agenda for adding value and delivering results*. Harvard Business School Press, USA

- Umar Tirtarahardja, La Sula. (2000), *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Reeneka Cipta.
- UNDP, Human Development Report 1995: New York: Oxford University Press 1995.
- Wahib Wahab (1999). *Demokrasi di Persimpangan Muka: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Terjemahan Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahyudin, Dinn. 2007. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Woodward & Marquis, (1955). *Implikasi Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zamroni, (tt.) *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Cet. I; Yogyakarta: Bigraf, t.t.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDG's);

Ditpenmas Dirjen PAUDNI (2011) Pedoman Pembentukan Penyelenggaraan PKBM. Jakarta Kemendikbud

Pemda Jabar (2010) Menuju Masyarakat BER-PHBS di Desa Membangun Menuju Desa Peradaban. Bandung, Pemda Jabar.

Profil Penulis



H. A. Rusdiana lahir di Puhun Ciamis pada tanggal 21 April 1961, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Sukarta (Alm), dengan Ibu Junirah. Sejak kecil mengikuti orang tua di Dusun Puhun Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Sekolah Dasar pada tahun 1969 di SD Cinyasag I, tamat tahun 1975.

Madrasah Tsanawiyah di Panawangan Ciamis lulus tahun 1979, melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Cililin Bandung lulus tahun 1982. Tahun 1982 melanjutkan studi pada Fakultas Ushuluddin IAIN SGD Bandung, dalam rangka menyelesaikan studinya menulis risalah Sarjana Muda dengan judul *"Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Upara Memeongan"* studi kasus di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan memperoleh gelar *Bachelor Of Art (BA)*, lulus pada tahun 1985, selama itu tinggal di Asrama Gombong Layang Cipadung tahun 1978 sd. 1983. Pada tahun 1985 melanjutkan studi pada program Sarjana lengkap, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam rangka menyelesaikan studinya tahun 1987, menulis skripsi sarjana lengkap (S-1) dengan judul *"Perubahan Sosial Keagamaan di Jawa Barat"* studi kasus di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kab. Ciamis, dengan memperoleh gelar *Doctorandus (Drs.)*. Menyelesaikan Program S2 dengan menulis tesis *"Strategi Pengembangan PTAI" (IAIN menjadi*

UIN). memperoleh gelar Magister Manajemen (MM). tahun 2002. Tahun 2008 melanjutkan studi S3 pada Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung, selesai tahun 2012, dengan menulis Disertasi “ Implementasi Kebijakan WASDALBIN pada PTAIS.

Tahun 1986 sambil menyelesaikan program doktoral diangkat sebagai PNS di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 1988 mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala SubBagian Rumah Tangga, tahun 1989 menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha, tahun 1992, sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga kembali, bersamaan dengan itu sejak tahun 1992, menjabat Bendahara Proyek PPTA IAIN SGD selama 2 tahun tahun anggaran 1991/1992 sd.1992/1993, berikutnya menjabat Pemimpin Proyek selama 2 tahun anggaran 1993/1994 sd. 1994/1995. Kemudian pada tahun 1995 menjabat Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, pada tahun 1999 menjabat Kepala Bagian Akademik selama 6 tahun, pada tahun 2004 menjabat Kepala bagian Administrasi PTAIS pada Kopertais Wilayah Jawa Barat dan Banten.

Selama menjabat Kepala Bagian era IAIN SGD, telah terlibat pula dalam momen-momen penting pada pengembangan IAIN diantaranya: (1) sebagai anggota tim Penyusun Borang Akreditasi IAIN SGD Bandung tahun 2007; (2) Proposal pengembangan IAIN menjadi UIN tahun 2000; (2) sebagai anggota tim penyusun Kurikulum KBK IAIN SGD Bandung tahun 2004; sekretaris tim penyusunan Pola Pembinaan Pengembangan PTAIS pada Kopertais Wilayah II Jabar-Banten tahun 2005.

Selanjutnya mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Dosen ISBD, Manajemen, dan Kewirausahaan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung, mengajar pula di beberapa PTAIS Kopertais Wilayah II Jabar Banten, serta dipercaya sebagai konsultan Manajemen PTAIS. Kegiatan ilmiah yang dilakukan

menyusun buku ajar Manajemen SDM, Pengantar Manajemen tahun 2002. Ilmu sosial dan Budaya Dasar tahun 2007, Manajemen Kewirausahaan Fakultas Sains dan Teknologi.

Menulis pada jurnal pada Mimbar Studi UIN SGD tahun 1994, dan Jurnal Istek Fakultas Sain dan Tekologi, melakukan penelitian kebijakan penerimaan mahasiswa UIN SGD Bandung tahun 2007.

Sesuai dengan moto hidupnya "*belajar dan mengabdikan*", Disamping sebagai Pegawai Negeri Sipil, tak luput dari pengabdian kepada masyarakat yang diwujukan dalam menggagas pendirian dan pembinaan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung dengan mengembangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, di Yayasan ini dipercaya menjabat Kepala MI tahun 1984-1987. dan Sekretaris Yayasan sejak tahun 1984 sampai sekarang. Bersamaan dengan itu, mempunyai garapan khusus melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya di sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Ciamis.